



**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS AUDIT  
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka  
Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Yusuf Fidi Aidia Erlangga**

**NIM 170810301302**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**



**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS AUDIT  
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka  
Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu  
syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai  
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh**

**Yusuf Fidi Aidia Erlangga**

**NIM 170810301302**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2022**

## PERSEMBAHAN

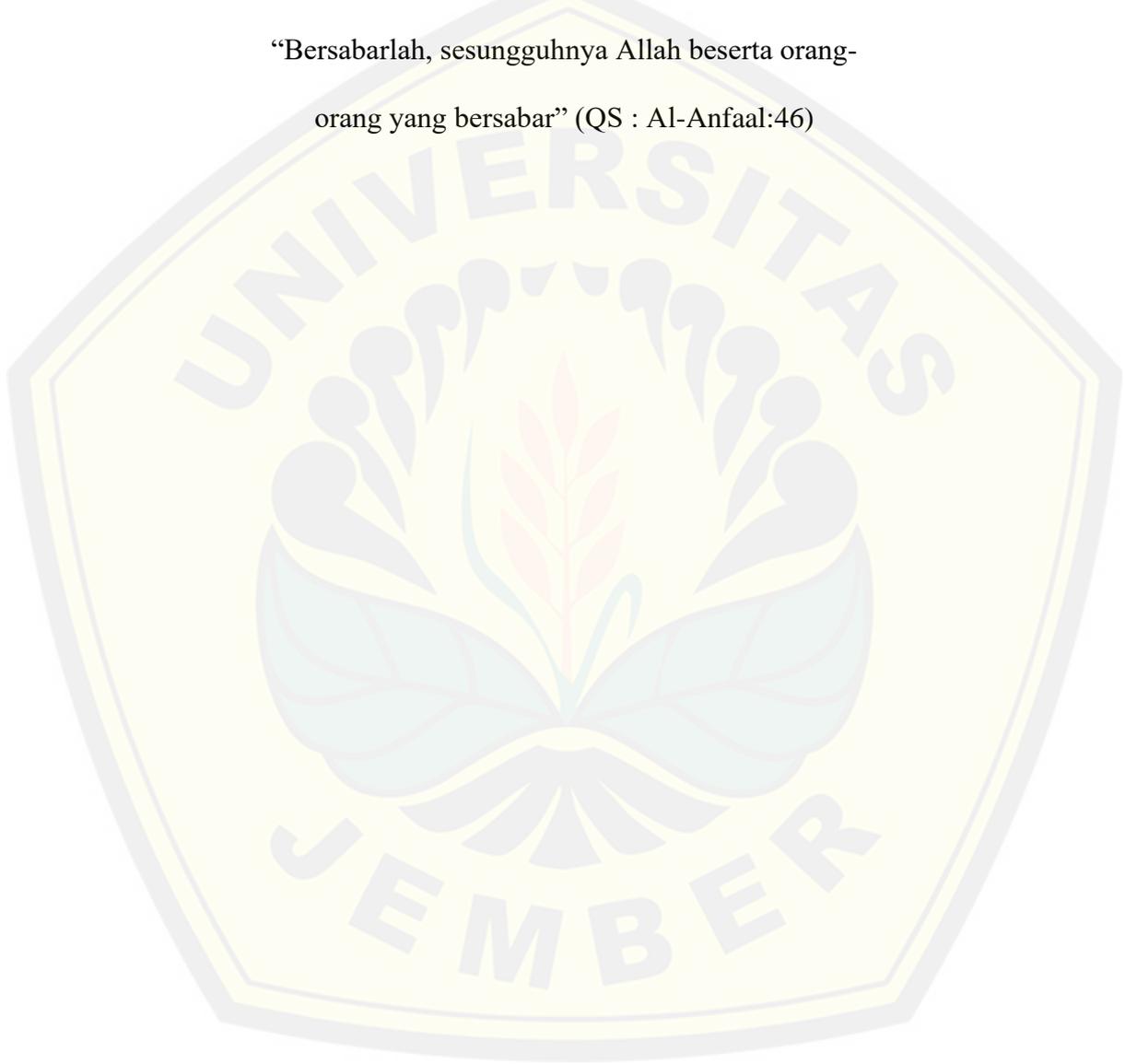
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik – baiknya. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu saya yang saya sayangi, yang selama ini senantiasa mendidik serta membimbing saya. Terimakasih atas segala dukungan baik moril maupun materil, serta segala bentuk usaha dan jerih payahnya selama ini
2. Guru-guru semenjak saya duduk dibangku taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi
3. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan doa dan dukungannya
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

**MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya”. (QS: Al-Baqarah:286)<sup>1</sup>

“Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar” (QS : Al-Anfaal:46)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Fidi Aidia Erlangga

NIM : 170810301302

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ **Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* ( Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**” adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sebelumnya dan belum pernah diajukan di instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 15 Maret 2022

Yang menyatakan



Yusuf Fidi A.E

NIM 170810301302

**SKRIPSI**

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
KUALITAS AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia)**

Oleh

**Yusuf Fidi Aidia Erlangga**

**NIM 170810301302**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama : Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak.**

**Dosen Pembimbing Anggota : Bunga Maharani, S.E., M.SA.**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : *PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus Perusahaan Sektor Aneka Industri terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)*

Nama Mahasiswa : Yusuf Fidi Aidia Erlangga

NIM : 170810301302

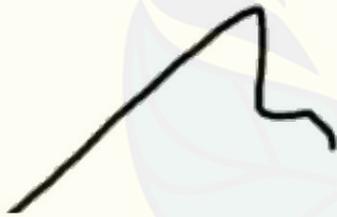
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal : 15 Maret 2022

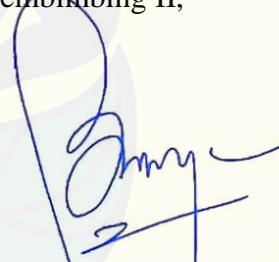
Persetujuan

Pembimbing I,



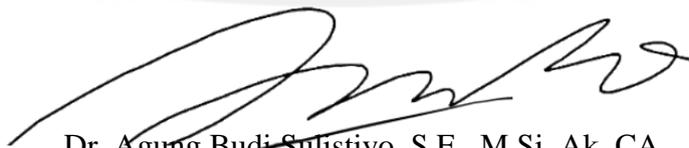
Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 197102172000031001

Pembimbing II,



Bunga Maharani, SE., M.SA.  
NIP. 198503012010122005

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1-Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA.  
NIP. 19780927 200112 1002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
KUALITAS AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yusuf Fidi Aidia Erlangga  
NIM : 170810301302  
Program Studi : Sarjana I  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal:

**28 MARET 2022**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com. (.....)  
NIP. 196408091990032001  
Anggota : Moch. Shulthoni, S.E, MSA. (.....)  
NIP. 198007072015041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember



Dr. Isti Fadah, M.Si.

NIP.196610201990022001

Yusuf Fidi Aidia Erlangga

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

### **ABSTRAK**

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan dengan meningkatkan pengelolaan secara sistematis dan baik demi keberlangsungan perusahaan ke depan terutama dalam hal pembayaran pajak yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada negara pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai keperluan kenegaraan serta mensejahterakan kepentingan warga negara secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk beberapa faktor yang menentukan penerapan *Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar pada BEI tahun 2018-2020 dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 21 perusahaan dengan data observasi 63. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data analisis menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sedangkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**Kata kunci : Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial , Kualitas Audit, *Tax Avoidance***

Yusuf Fidi Aidia Erlangga

*Accounting Departement, Faculty of Economic and Business,  
Jember University*

**ABSTRACT**

*The Corporate Governance mechanism is a corporate governance system by improving management systematically and well for the sustainability of the company in the future, especially in terms of paying taxes which is a form of corporate responsibility to the state. The tax is used by the state to finance state needs and for the welfare of the interests of citizens in general. . This study aims to determine several factors that determine the implementation of Corporate Governance and Audit Quality on Tax Avoidance. The research sample used is the industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020 using purposive sampling. The sample obtained is 21 companies with 63 observation data. This research method uses quantitative methods. Data analysis using multiple linear analysis. The results showed that Independent Commissioners, Institutional Ownership and audit quality had no effect on Tax Avoidance, while Managerial Ownership had no effect on Tax Avoidance.*

***Keywords: Independent Commissioner, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Audit Quality, Tax Avoidance***

## RINGKASAN

**Pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).** Yusuf Fidi Aidia, 170810301302: 71 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pajak merupakan salah satu bentuk penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam menjalankan operasional kenegaraan yang memiliki sifat memaksa serta tidak memberikan manfaat secara langsung untuk masyarakat. Pengelolaan pajak terdapat dua jenis wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar serta melaporkan kegiatan perpajakan perusahaan yang berguna untuk menjaga nama baik perusahaan dan mempunyai nama baik di antara para investor perusahaan sebagai penanam modal.

FCGI Indonesia menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan aturan tentang relasi antara pemilik saham, pegawai perusahaan, kreditur, *governance*, *employee* dan juga pihak *external & internal* yang berkepentingan dan pertumbuhan integritas perusahaan. GCG sendiri memiliki 2 mekanis berbeda dan saling berhubungan adalah *external & internal*. Mekanisme internal adalah tahap pengendalian perusahaan dengan cara seperti penggunaan *structure and internal proses* RUPS, Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta rapat Board Of Director, Sedangkan mekanisme *external* yaitu seperti *internal control company*, *owner structure and market control*. Kebutuhan akan komunikasi serta pengawasan yang baik diperlukan demi tercapainya untuk mendapatkan tata kelola perusahaan yang baik.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2020 dan berjumlah 21 emiten. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diambil berjumlah 63

data yang berasal dari 21 perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dan tidak mendapat kerugian dalam kurun periode penelitian.

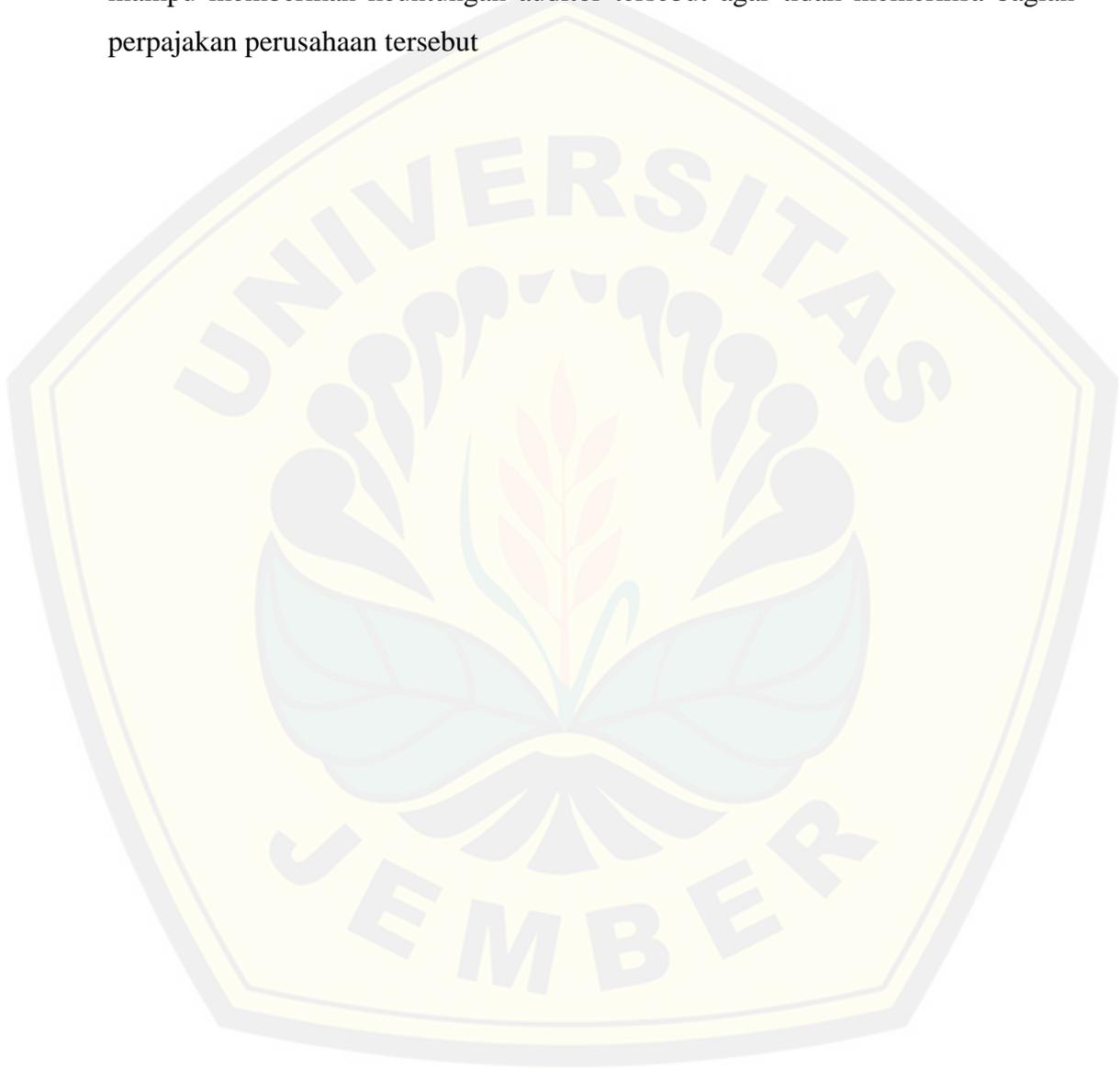
*Tax avoidance* diukur menggunakan *effective tax ratio* (ETR) dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Dewan Komisaris Independen (X1) diukur menggunakan jumlah dewan komisaris dibagi dengan jumlah komisaris independen. Kepemilikan Institusional (X2) diukur menggunakan perbandingan antara kepemilikan saham institusional dengan jumlah saham beredar. Kepemilikan Manajerial diukur dengan menggunakan perbandingan kepemilikan saham pihak manajemen dengan jumlah saham beredar. Kualitas audit (X4) diukur menggunakan skala *dummy* kategori 1 jika laporan keuangan diaudit oleh KAP *The Big Four* dan 0 jika tidak menggunakan jasa audit KAP *The Big Four*.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat menjadi indikasi jika kemampuan komisaris independen masih kurang baik dalam melakukan pengawasan dan hanya sebagai syarat yang ditetapkan oleh BEI yaitu sebesar 30% saja.

Hasil pengujian analisis regresi berganda pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat menjadi indikasi jika besar maupun kecilnya jumlah pemegang saham diluar perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan karena lebih mementingkan profit yang tinggi

Hasil pengujian analisis regresi berganda pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*, menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. Hal ini dapat menjadi indikasi jika semakin besar kepemilikan saham manajerial maka akan semakin efektif sebagai alat pengontrol dalam kebijakan kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan

Hasil pengujian analisis regresi berganda pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*, menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat menjadi indikasi jika perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP the big four maupun non big four akan tetap melakukan *tax avoidance* jika perusahaan tersebut mampu memberikan keuntungan auditor tersebut agar tidak memeriksa bagian perpajakan perusahaan tersebut



**SUMMARY**

***The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study on Various Industrial Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange).***

*Yusuf Fidi Aidia, 170810301302: 71 pages; Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Jember.*

Tax is a form of state income that is used to finance the needs of carrying out state operations which have a coercive nature and do not provide direct benefits to the community. There are two types of taxpayers in tax management, namely individual taxpayers and corporate taxpayers. The company as one of the taxpayers has an obligation to the state to pay and report corporate tax activities that are useful for maintaining the good name of the company and have a good name among the company's investors as investors.

FCGI Indonesia explained that corporate governance is a rule regarding the relationship between shareholders, company employees, creditors, governance, employees as well as external & internal interested parties and the growth of company integrity. GCG itself has 2 different and interconnected mechanisms, namely external & internal. The internal mechanism is the stage of controlling the company by means of the use of the structure and internal processes of the GMS, the Board of Directors, the Board of Commissioners and Board of Directors meetings. Meanwhile, external mechanisms, such as the company's internal control, owner structure and market control. The need for good communication and supervision is needed in order to achieve good corporate governance.

This type of research is a quantitative research. The population in this study are industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2018-2020 period and totaling 21 issuers. Sample selection was done by purposive sampling technique. The sample taken amounted to 63 data from 21 companies that reported financial reports and did not receive a loss during the research period.

*Tax avoidance* measured using the effective tax ratio (ETR) by dividing the income tax burden with profit before tax. Independent Commissioners (X1) is measured using the number of commissioners divided by the number of

independent commissioners. Institutional Ownership (X2) is measured using a comparison between institutional share ownership and the number of outstanding shares. Managerial Ownership is measured by using the comparison of management's share ownership with the number of outstanding shares. Audit quality (X4) is measured using a dummy scale of category 1 if the financial statements are audited by KAP The Big Four and 0 if not using the audit services of KAP The Big Four.

This study uses multiple linear regression analysis. The results of testing the influence of independent commissioners on *tax avoidance*, show that the results have no significant effect. This can be an indication if the ability of the independent commissioners is still not good in carrying out supervision and only as a condition set by the IDX, which is only 30%.

Results Multiple regression analysis testing the effect of institutional ownership on *tax avoidance* shows results that do not have a significant effect. This can be an indication if the large or small number of shareholders outside the company does not affect the tax aggressive actions taken by the company because it is more concerned with high profits.

Results Regression analysis testing the effect of managerial ownership on *tax avoidance*, shows the results have a significant effect. This can be an indication that the greater the managerial share ownership, the more effective it will be as a controlling tool in the company's *tax avoidance* policies.

The results of multiple regression analysis testing the effect of audit quality on *tax avoidance*, show the results have no significant effect. This can be an indication that companies that use audit services for the big four and non-big four KAPs will continue to carry out *tax avoidance* if the company is able to provide the auditor with benefits so as not to examine the tax department of the company.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**”

Dalam kesempatan ini saya sebagai penulis menyadari sepenuhnya bahwa hal ini tidak akan terwujud dan selesai tanpa bantuan, motivasi maupun masukan dari berbagai pihak sejak penulisan hingga selesainya laporan ini. Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan tugas akhir ini :

1. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com., Ak. Selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistyono, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Bunga Maharani, S.E., M.SA. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan semasa kuliah

7. Seluruh Karyawan dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membantu memenuhi kelengkapan berkas persyaratan kelulusan
8. Ayah dan Ibu yang telah membimbing, mendukung serta sabar sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat dan teman yang telah mendukung dan mendoakan sehingga skripsi ini bisa selesai
10. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
11. Semua pihak yang telah membantu saya atas penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu

Penulis menyadari jika sepenuhnya atas penelusian skripsi ini, untuk itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun demikian laporan akhir ini semoda dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita semua

Jember, 15 Maret 2022



Penulis

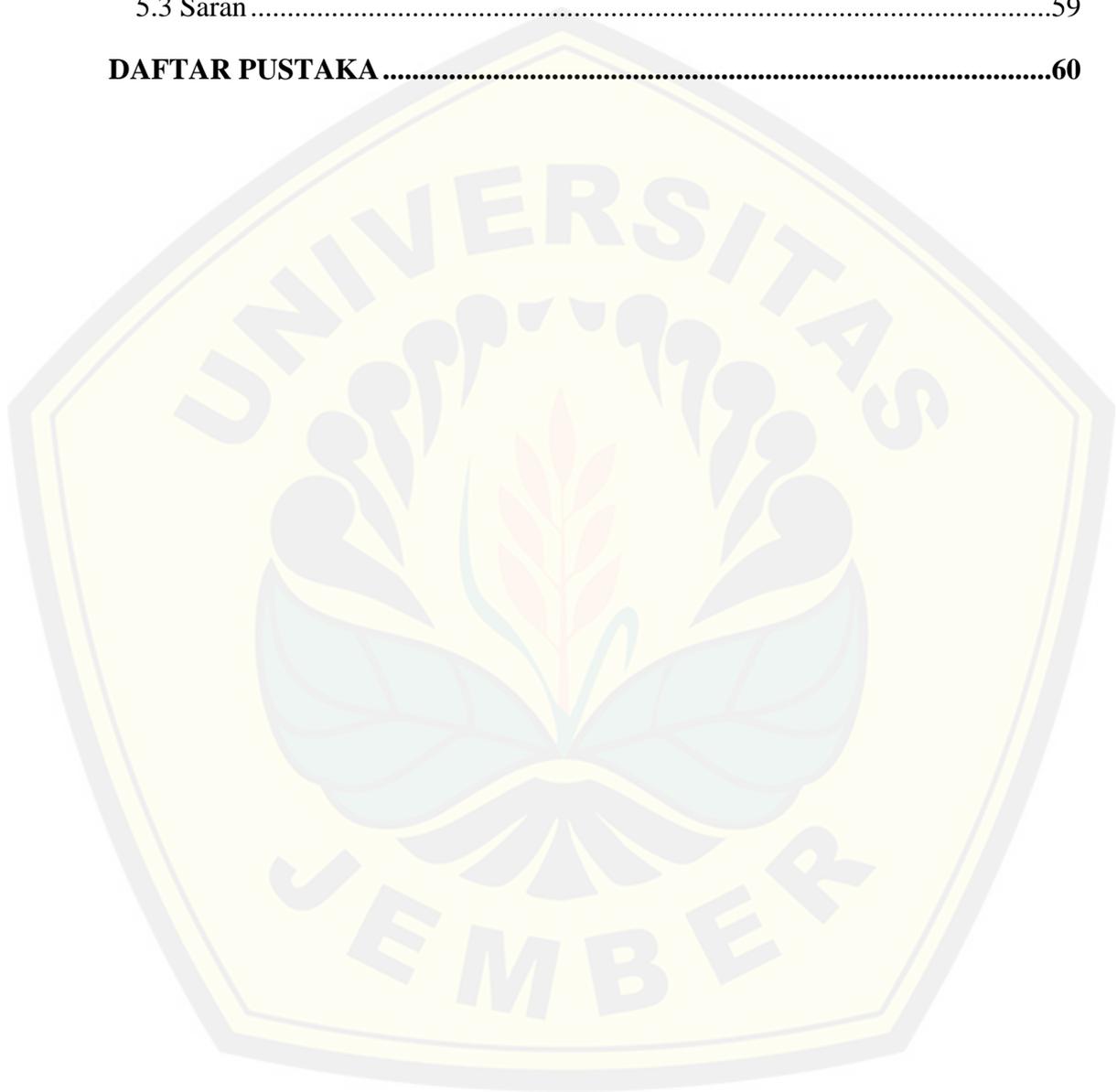
**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xiv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>

2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Agensi .....	8
2.1.2 Perpajakan.....	11
2.1.3 Corporate Governance .....	15
2.2 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> .....	17
2.3 Kepemilikan Institusional.....	18
2.4 Kepemilikan Manajerial .....	18
2.5 Dewan Komisaris .....	19
2.6 Kualitas Audit.....	20
2.7 <i>Tax Avoidance</i> .....	22
2.8 Penelitian Terdahulu.....	24
2.9 Kerangka Konseptual .....	28
2.10 Pengembangan Hipotesis .....	29
2.10.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	29
2.10.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	30
2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	31
2.10.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	32
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Jenis dan Sumber data .....	33
3.3 Populasi dan Sampel .....	33
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukurannya.....	34
3.4.1 <i>Tax Avoidance</i> .....	34
3.4.2 Kepemilikan <i>Institusional</i> .....	35
3.4.3 Kepemilikan Manajerial .....	35

3.4.4 Komisaris Independen .....	35
3.4.5 Kualitas Audit .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Metode Analisis Data .....	37
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	37
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.3 Pengujian Hipotesis .....	38
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	40
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Sampel .....	43
4.2 Analisis Data .....	44
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	44
4.3 Uji Normalitas .....	45
4.3.1 Uji Multikolinieritas .....	46
4.3.2 Uji Autokorelasi.....	47
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	47
4.4 Uji Hipotesis.....	48
4.4.1 Uji f.....	49
4.4.2 Uji t .....	50
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	51
4.5 Pembahasan .....	52
4.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris <i>Independent</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	52
4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	53
4.5.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	54
4.5.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	55

<b>BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	58
5.3 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

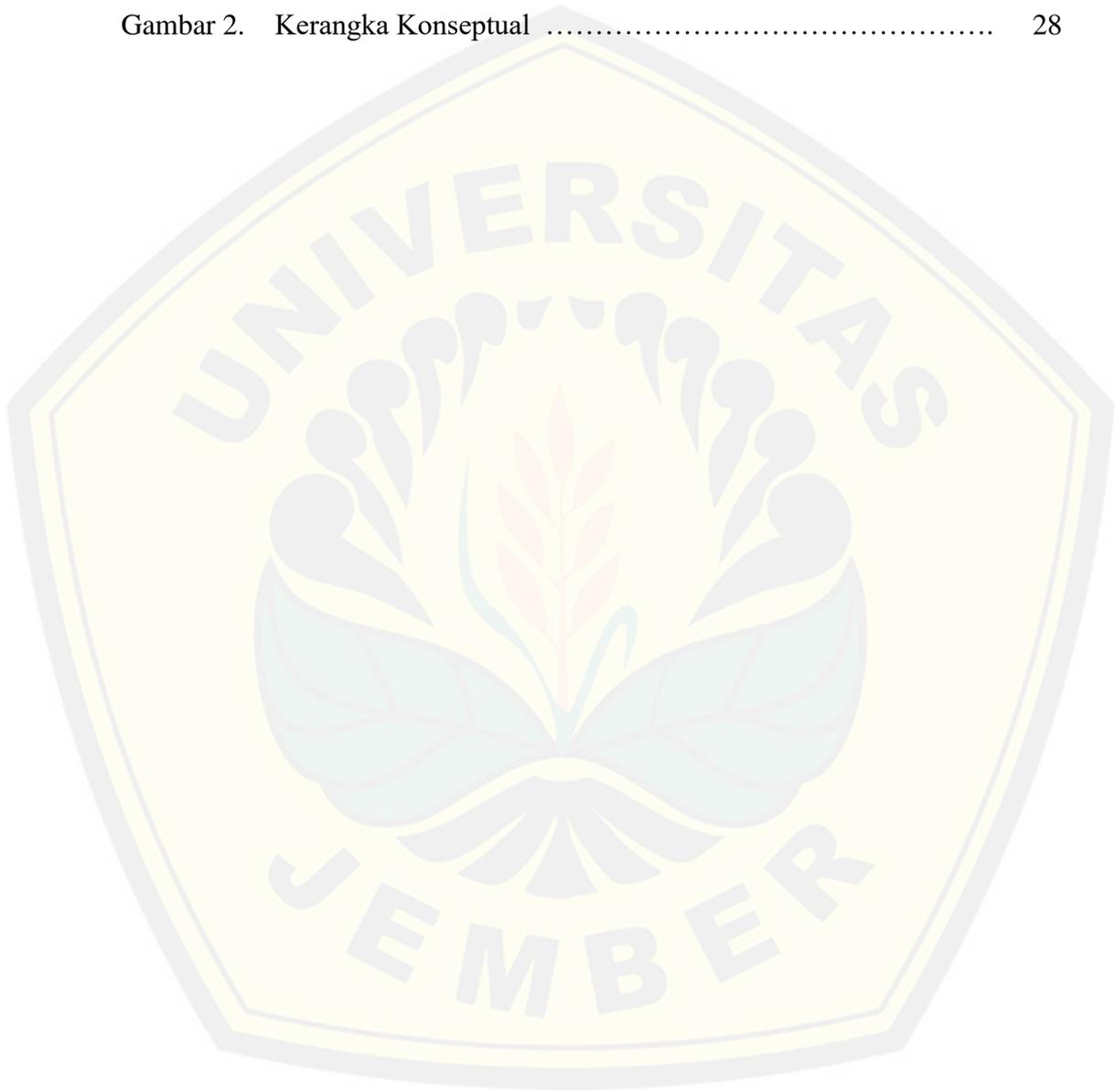


**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	<i>Research Gap</i> .....	26
Tabel 4.1	Kriteria Sampel .....	43
Tabel 4.2	Hasil Statistik Deskriptif .....	44
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas .....	46
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinieritas .....	46
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi .....	47
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	48
Tabel 4.7	Hasil Analisa Regresi Variabel Koefisien .....	48
Tabel 4.8	Hasil Uji Model Fit .....	49
Tabel 4.9	Hasil Uji t .....	50
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	51

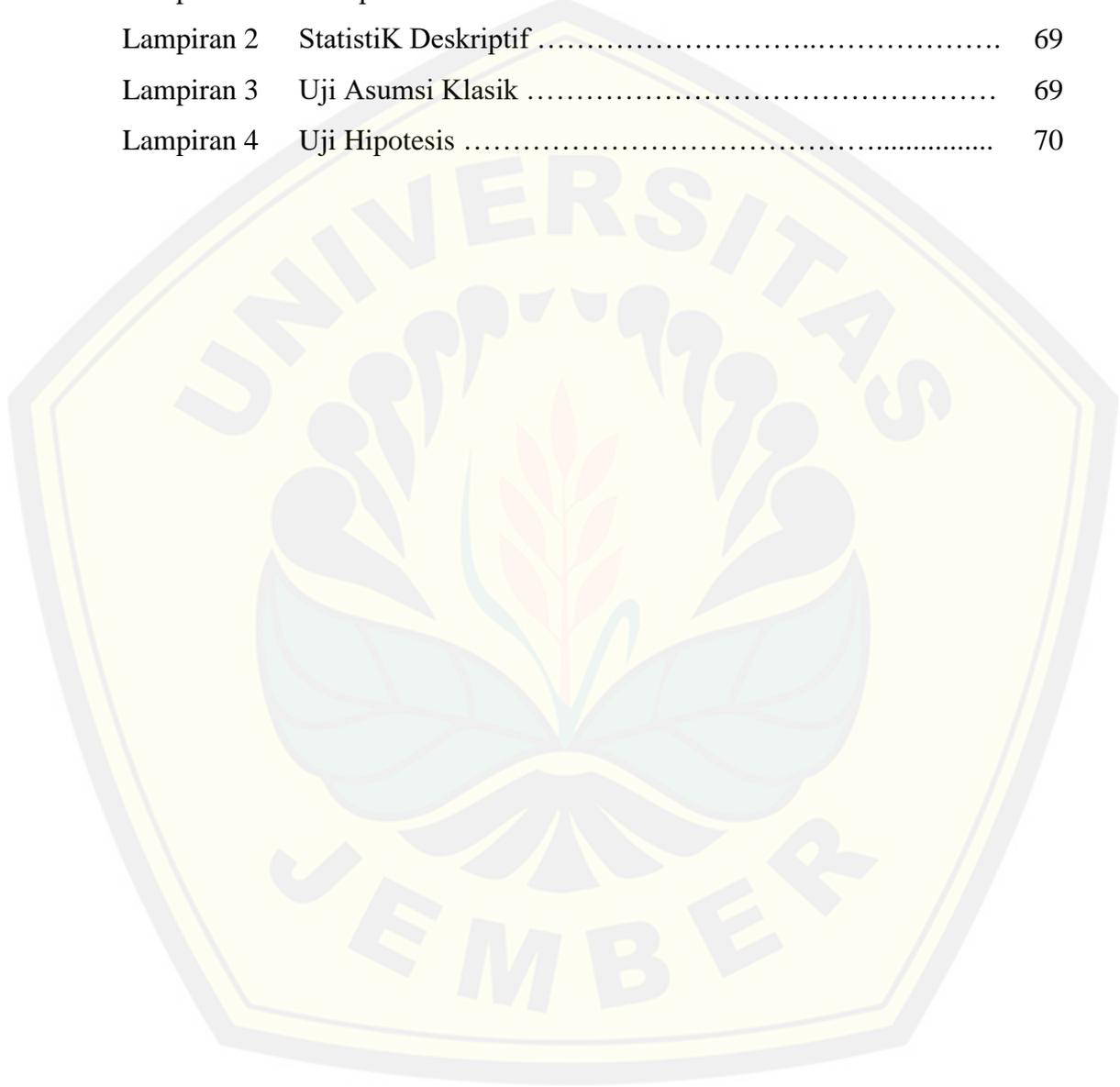
**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Tren Laba Perusahaan Aneka industri .....	4
Gambar 2.	Kerangka Konseptual .....	28



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Rekap Data Penelitian .....	64
Lampiran 2	Statistik Deskriptif .....	69
Lampiran 3	Uji Asumsi Klasik .....	69
Lampiran 4	Uji Hipotesis .....	70



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu pendapatan negara terbesar bersumber dari pendapatan pajak, Indonesia sebagai salah satu negara yang menggunakan APBN dalam pembiayaan negara selalu berusaha dalam mendapatkan jumlah penghasilan pajak yang semestinya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan memiliki sifat yang memaksa, tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dan digunakan demi kepentingan masyarakat secara luas. Ketentuan perpajakan ini tercantum pada Undang-undang nomor 28 Th. 2007 mengatur perihal pajak (KUP).

Pentingnya peran pajak untuk negara dan masyarakat mendorong pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Menurut Maretta et al (2019) pemungutan pajak yang secara efektif dilakukan oleh pemerintah dapat menghasilkan jumlah yang tinggi, namun perbedaan kepentingan antara negara dan juga wajib pajak akibat tarif pajak yang tinggi dan juga target realisasi pajak negara yang dipatok tinggi mengakibatkan penerimaan pajak yang dilakukan belum terlalu optimal. Terdapat dua jenis wajib pajak di Indonesia yaitu pertama wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak badan dikenakan terhadap perusahaan dan bukan perorangan sebagai suatu wujud kontribusi serta keikutsertaan perusahaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pembayaran pajak. Menurut UU Nomor 36 Th. 2008 pasal 2 ayat 1b menyatakan perusahaan adalah salah satu wajib pajak badan memiliki kewajiban membayar pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku, yang didapat melalui total profit bersih sebelum pajak dikali tarif perpajakan yang berlaku. Perbedaan pandangan muncul dikalangan wajib pajak dalam melihat perspektif perpajakan, hal ini karena membayar pajak tentunya akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Pemenuhan tujuan manajemen perusahaan adalah untuk mencari keuntungan setinggi mungkin demi melaksanakan tanggung jawab yang diberikan investor

terhadap manajemen. Tingginya beban pajak mengakibatkan peran perusahaan untuk bekerja keras mengurangi jumlah pajak yang dikeluarkan dan salah satu caranya adalah manajemen pajak (Wijayani, 2016). Upaya perusahaan lakukan dalam upaya mengurangi beban pajak adalah menggunakan *tax planning* hingga beban pajak yang tinggi bisa berkurang, namun masih dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. *Tax planning* sangat berkaitan dengan tingkah laku perlawanan pajak, perilaku ini ada dua jenis adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*, jika *tax evasion* berusaha meminimalkan beban pajak perusahaan dengan ilegal, maka *tax avoidance* berusaha meminimalisir beban pajak perusahaan secara legal sesuai dengan ketentuan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan (Pohan, 2016).

*Corporate governance* dilatarbelakangi oleh teori keagenan. Teori keagenan sendiri merupakan hubungan kontrak yang dimiliki *principal* dan *agent* dalam mengelola perusahaan. Pengelolaan suatu perusahaan dipisahkan dari kepemilikan, maka permasalahan keagenan akan muncul. Sebagai seorang pemilik modal, seorang investor akan mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada manajemen yang lebih profesional, sehingga wewenang diberikan *principal* kepada agen untuk mengelola sumber daya perusahaan. Benturan kepentingan seringkali terjadi antara pihak investor maupun manajer akibat kepentingan yang berbeda, diantaranya manajer memiliki informasi lebih dalam situasi tersebut dan akhirnya menggunakan informasi tersebut sebagai keuntungan pribadi dan mengorbankan kepentingan *principal*, yang mampu berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Konflik agensi dapat menimbulkan permasalahan aktivitas penghindaran pajak oleh pihak manajemen.

Implementasi tata kelola yang baik bagi perusahaan dapat menambah nilai tambah untuk para investor dalam memberikan modal untuk perusahaan tersebut. FCGI Indonesia menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan aturan tentang relasi antara pemilik saham, pegawai perusahaan, kreditur, *governance*, *employee* dan juga pihak *external & internal* yang berkepentingan dan pertumbuhan integritas perusahaan. *Corporate governance* sendiri memiliki 2 mekanisme

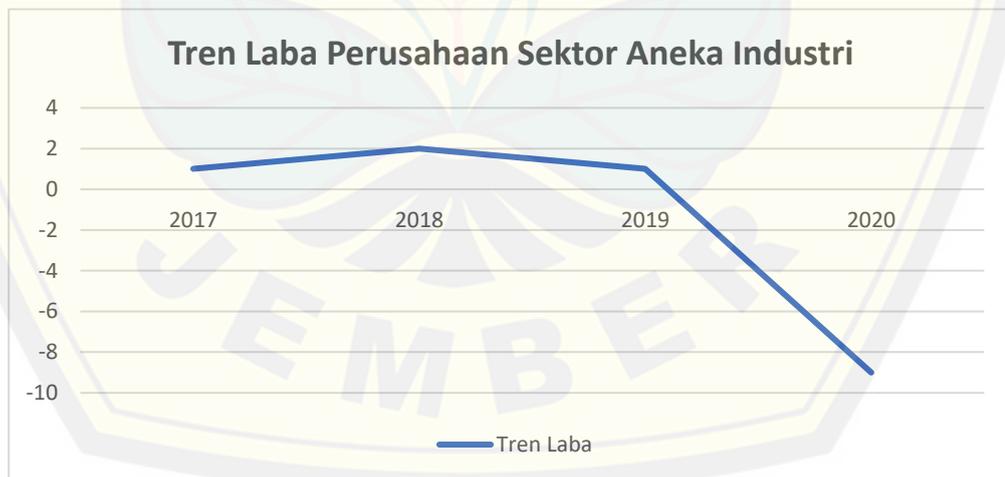
berbeda dan saling berhubungan yaitu *external & internal*. Mekanisme internal adalah tahap pengendalian perusahaan dengan cara seperti penggunaan internal proses melalui RUPS, Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta rapat-rapat dewan direksi. Sedangkan mekanisme *external* yaitu seperti *internal control company, owner structure and market control*. Pengelolaan yang baik adalah ketika semua keputusan yang dibuat oleh manajemen selalu diawasi oleh pihak *principals*, sehingga keputusan yang dibuat dapat konsisten sebagai tujuan perusahaan. (Fadhillah, 2014).

Peran *corporate governance*, memiliki keterkaitan dengan kualitas audit. Tujuan dalam melakukan audit yaitu demi memberi suatu opini atas wajarnya laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau entitas. Proses auditing sendiri untuk mengumpulkan bukti serta informasi untuk melaporkan kesesuaian informasi dengan kenyataan dan terjadi di lapangan. Kualitas audit terjadi saat auditor menilai suatu kewajaran laporan keuangan perusahaan, dan auditor dapat memilih serta mendeteksi kecurangan atau *human error* akibat kelalaian yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Demi mewujudkan hal tersebut dibutuhkan auditor kompeten dan berintegritas.

Menurut Krisna (2019) kualitas audit berarti bahwa penyusunan laporan audit yang dibuat auditor tidak hanya menemukan kecurangan atau *error* dalam laporan keuangan namun diperlukan kemampuan seorang auditor untuk menjelaskan temuan penyimpangan pada laporan keuangan klien. Selama melakukan audit, auditor wajib mematuhi prinsip transparansi sebagai anggota tata kelola perusahaan yang baik. Auditor wajib menunjukkan transparansi kepada dan mengkomunikasikan hal sensitif dan berkaitan mengenai permasalahan pendapatan serta pengeluaran perusahaan dalam laporan keuangan yang dapat berdampak untuk hutang pajak perusahaan. Pengguna laporan keuangan memiliki pemikiran hasil audit yang berkualitas dapat memberi jaminan tidak adanya salah saji material ataupun kecurangan dalam laporan keuangan dan bagi seorang auditor memiliki pemikiran bahwa pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan standar profesional dapat meminimalisir ketidakpuasan dan menjaga reputasi seorang auditor

Penelitian yang dilakukan untuk perusahaan industri *go public* yang ada di BEI. Saham perusahaan terdaftar di BEI merupakan saham terseleksi dengan likuiditas tinggi dan efektif, hal ini dikarenakan perusahaan yang telah terdaftar pada BEI beragam jenis dan juga dapat dipertanggungjawabkan datanya pada masyarakat. Sektor aneka industri merupakan salah satu sektor prioritas dimana didalam sektor aneka industri memiliki beberapa sub sektor dan diantaranya merupakan sub sektor tekstil dan garmen, sub sektor elektronik serta sub sektor otomotif yang didukung perkembangannya oleh pemerintah (Kemenperin, 2019). Sektor aneka industri salah satu yang paling banyak diminati dan menjadi peluang bagi investor, namun sektor ini juga merupakan salah satu sektor yang rawan terkena dampak krisis dan akibatnya perusahaan akan selalu dituntut bukan hanya untuk dapat memperoleh keuntungan namun disatu sisi juga harus memiliki laporan keuangan yang baik serta transparan khususnya dalam pembayaran pajak agar perusahaan tersebut terlihat baik dimata investor. Data pada penelitian ini merupakan perusahaan merupakan perusahaan Aneka industri terdaftar BEI mulai tahun 2018-2020.

**Gambar 1.1 Tren Laba Perusahaan Sektor Aneka Industri**



Sumber : data diolah

Terlihat dalam data yang sudah diolah oleh peneliti menunjukkan tren kenaikan laba dari tahun 2017 sampai 2018 sebanyak 2%, namun terjadi penurunan akan tetapi cenderung stabil di tahun 2019 sebanyak 1%. Hal ini menjadi bukti tren kenaikan laba perusahaan aneka industri seharusnya akan berpengaruh terhadap

kenaikan pajak perusahaan. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa pertumbuhan industri manufaktur juga tumbuh meskipun melambat setiap tahunnya. Tahun 2018 pertumbuhan produksi industri sebesar 4,27% angka ini lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 4,29% namun lebih tinggi dari pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 4,26% dan ditahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 0,47% dari tahun sebelumnya. hal ini yang menjadi alasan peneliti ingin melakukan penelitian terhadap sektor aneka industri.

Penelitian dari Avianita & Fitria (2020) memberi kesimpulan jika kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berdampak pada *tax avoidance*, tapi berbeda dari penelitian sebelumnya dimana penelitian Septiadi et al (2017) menjelaskan kepemilikan institusional & kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Waluyo (2017) mengenai *Good Corporate Governance* & penghindaran pajak menunjukkan jika dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal ini juga selaras atas penelitian milik Sunarsih & Handayani (2018) dan menunjukkan jika proporsi dewan komisaris independen berdampak pada kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi berbeda dengan ungkapan Dewi & Sari (2015) melalui penelitian yang menunjukkan jika proporsional dewan komisaris independen tidak berdampak pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menyatakan jika kualitas audit berpengaruh pada *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian jasa auditor *big four* pada perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit tersebut. Hal ini dilakukan perusahaan agar informasi didalam laporan keuangan perusahaan khususnya berkenaan dengan pajak agar dapat lebih dipercaya. Hasil penelitian sebelumnya juga selaras dengan penelitian Sunarsih & Handayani (2018) yaitu kualitas audit berpengaruh pada *tax avoidance*, tetapi Wijayanti et al (2018) dalam penelitiannya menjelaskan jika kualitas audit tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance* dan menunjukkan jasa auditor Kantor Akuntan Publik *big four* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dari perusahaan karena seorang auditor

memang sudah sewajarnya mengikuti standar auditor yang berlaku demi menjaga independensi dan sikap seorang auditor.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan terdapat beberapa inkonsistensi penelitian dan menarik peneliti mengetahui serta menganalisis tentang hal yang mempengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan atas penjelasan latar belakang permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

### **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
- b. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
- c. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
- d. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
- c. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*
- d. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

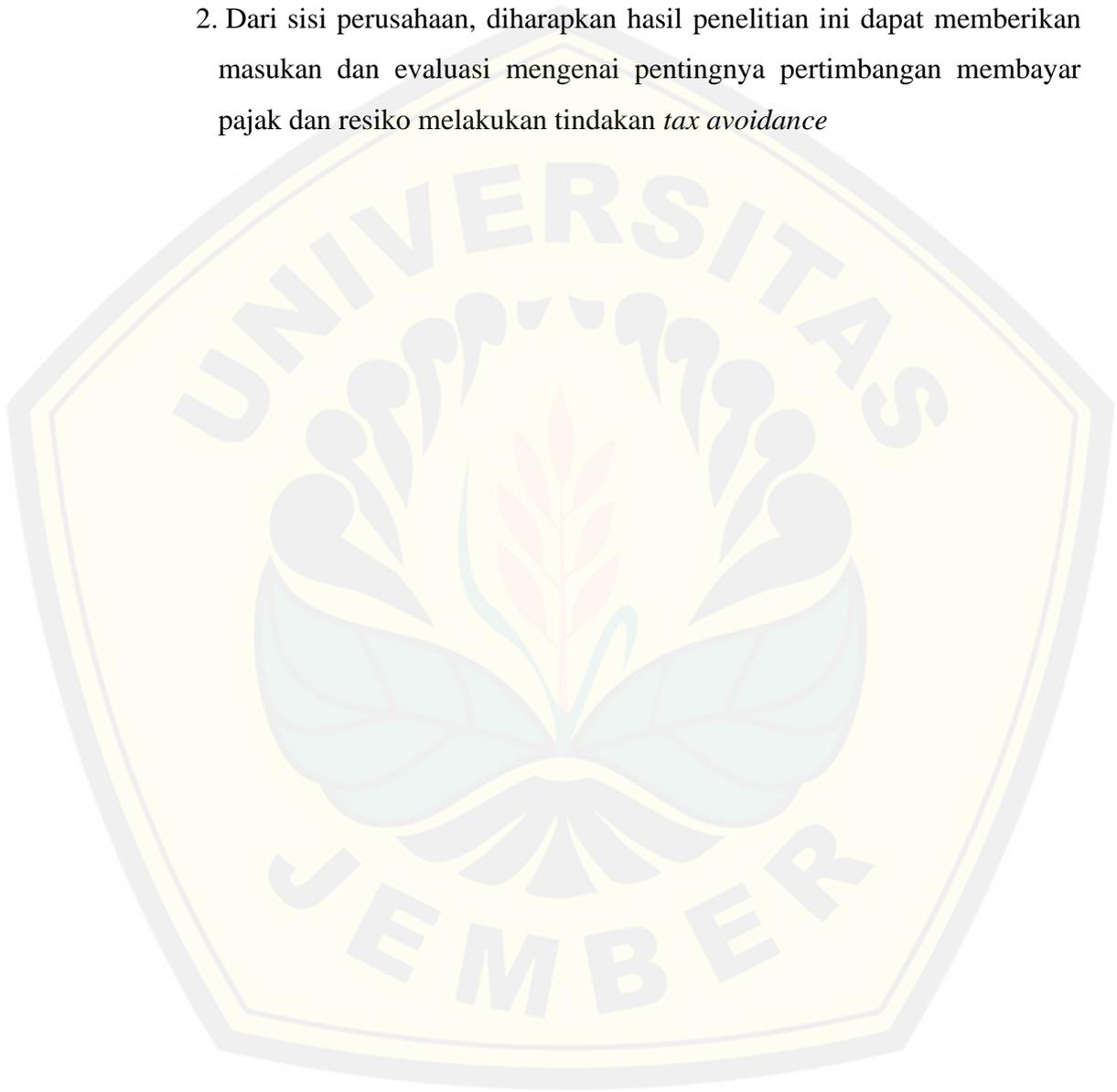
### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Bagi pengembangan teori maupun pengetahuan dibidang akuntansi, terutama bidang yang berkaitan dengan perpajakan serta dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik yang serupa

b. Manfaat Praktisi

1. Bagi Investor penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memilih perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi *corporate governance* perusahaan tersebut
2. Dari sisi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi mengenai pentingnya pertimbangan membayar pajak dan resiko melakukan tindakan *tax avoidance*



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Agensi

*Agency Theory* adalah landasan teori untuk melakukan pemahaman dari *Corporate Governance*. Konsep dari teori agensi didalamnya dijelaskan tentang *contractual relation* atau hubungan kontraktual mengenai pemilik maupun dengan agen (manajer) Jensen & Meckling, (1976). Banyaknya isu mengenai *Corporate Governance* yang merupakan pemisah antara kepemilikan pemilik dengan pengendalian perusahaan yang dilakukan manajer sering kali disebut dengan konflik keagenan. Tujuan *Corporate Governance* yang dilatar belakangi teori keagenan itu sendiri adalah untuk mendorong adanya *principal* dan agen dalam memenuhi tujuan yang sama, jika hal ini terjadi maka sebaliknya agen akan ikut turut mendukung dan melaksanakan semua yang diperintah oleh *principal*.

*Agency Problem* pertama kali di eksplorasi oleh Jensen dan Meckling (1976) yang berpendapat bahwa teori agensi berbicara mengenai pemilik adalah *principal* serta manajerial adalah agen. Peran pemegang saham ialah memberikan keputusan bisnis yang selanjutnya akan diteruskan ke manajer sebagai perwakilan dari pemilik saham, jadi pihak manajer diharapkan mampu bertanggungjawab atas kuasa yang diberikan pemegang saham. *Principal* menggunakan metode langsung sebagai monitoring pihak manajemen perusahaan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam perusahaan. Pertama-tama, pemilik saham mendapat hak memengaruhi operasi perusahaan yaitu memberikan suara dalam RUPS, dan hak suara adalah bagian terpenting mereka, selanjutnya pemilik saham membuat keputusan untuk secara kolektif melobi manajer (atas nama perusahaan) tentang masalah-masalah yang membuat sekelompok pemegang saham tidak puas dan juga pemegang saham juga memiliki opsi divestasi. Terdapat beberapa kepentingan yang bertentangan atas suatu perusahaan dimana berbagai anggota ingin mendapatkan

tujuan yang diinginkan. Hal ini terjadi akibat adanya suatu asimetri informasi antara manajeri & *principal* yang mengakibatkan kinerja suatu perusahaan kurang efektif karena beberapa kepentingan tersebut. Hubungan antara agen dan *principal* yang selalu didasari asimetri informasi, mengakibatkan setiap agen yang mengendalikan perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dari pada prinsipal. Merupakan sebuah peluang terbuka bagi agen memaksimalkan urgensi individu atau perilaku tak patut dan disebut dengan kelalaian. Hal tersebut akan berdampak pada kepentingan *principal*, yang akhirnya menggunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi dan melakukan kecurangan. Hal ini yang menyebabkan asumsi asumsi dalam teori keagenan yang diungkapkan oleh Eisenhardt (1989) yang menjelaskan jika terdapat 3 teori agensi ini adalah sebagai berikut :

- a. Asumsi tentang sifat manusia (*Human Assumption*)  
Perspektif manusia dalam berfikir lebih cenderung untuk lebih egois, memiliki limit pola pikir mengenai pendapat masa mendatang (*bounded rationality*) dan manusia cenderung untuk menghindari resiko (*risk averse*)
- b. Asumsi tentang keorganisasian (*Organizational Assumptions*)  
Konflik yang terjadi antar anggota organisasi berhubungan dengan efisiensi dalam melakukan produktivitas, serta asimetri informasi yang terjadi antara pemilik dan manajemen perusahaan
- c. Asumsi tentang informasi (*Information Assumption*)  
Informasi dipandang oleh perusahaan sebagai komoditas yang diperjualbelikan sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi.

Dampak permasalahan ekonomi modern menimbulkan berbagai macam permasalahan kepada pihak manajemen yang mengakibatkan pengelolaan perusahaan menjadi semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemegang

saham menyerahkan kepentingan dalam mengelola perusahaan kepada pihak manajemen profesional yang lebih mengerti bisnis tersebut. Tujuan dilakukannya pemisahan pengelolaan antara *agent* dan *principal* agar dalam melaksanakan tugasnya pihak manajemen dapat fokus memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin menggunakan tenaga profesional yang sudah diberi kuasa oleh *principal* sebagai penanggungjawab. Dampak negatif akibat pemisahan kewenangan dalam mengelola ini adalah adanya kebebasan pengelolaan oleh manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dapat mengarah pada proses dimana pihak manajemen perusahaan bertindak oportunistik untuk kepentingan diri sendiri yang mengakibatkan timbulnya biaya-biaya yang harus ditanggung. Fenomena pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan yang terdapat dimana-mana, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern (Jensen dan Meckling, 1976)

Jensen & Meckling (1976) dalam teori agensi menyebutkan berbagai macam upaya yang dilakukan untuk menghindari permasalahan tersebut. :

- a. *Monitoring cost*, merupakan *cost* ditujukan dalam melakukan *monitoring* untuk para *principal* serta memonitorisasi *activity* manajerial.
- b. *Bonding cost*, untuk keadaan terkait para manajemen diberi peluang dalam menggunakan dana untuk merubah dalam perusahaan namun tetap menjamin tanpa merugikan pihak investor
- c. *Residual cost*, yaitu *value or money* yang mampu mensejahterakan pemiliknya, serta *cost* yang muncul dari relasi agen atau biasanya disebut rugi residu.

*Agency Theory* berpendapat jika konflik serta asimetri informasi berkurang dapat melalui mekanika perusahaan terbaik yang seimbang dengan kepentingan anggota perusahaan dan agar berhasil perusahaan perlu menerapkan mekanisme *Corporate Governance*. Mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik dalam perusahaan dapat memberikan rasa percaya dan rasa aman kepada para pemilik

saham perusahaan mengenai ability manajerial untuk mengalokasikan dana untuk diinvestasikan pemilik saham, kemudian mampu meminimalkan konflik kepentingan serta cost agen. GCG dapat memberikan mekanika yang dapat meyakinkan jika keputusan manajerial telah seimbang dengan kepentingan pemilik saham. Asumsi yang terjadi akibat adanya teori keagenan nampaknya adalah adanya keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dibandingkan dengan kelompok serta sikap menolak untuk bekerja sama demi mencapai tujuan pribadi.

### 2.1.2 Perpajakan

#### a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi nyata dan wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat untuk kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.

Menurut Mardiasmo (2016) terdapat unsur unsur yang melekat pada pajak diantaranya adalah :

- 1) Iuran dari rakyat
- 2) Berdasarkan undang undang
- 3) Tanpa timbal nyata bagi negara
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Pemungutan Paajak seringkali dianggap membebani sebagian masyarakat maupun perusahaan dikarenakan laba yang mereka terima secara tidak langsung berkurang namun manfaat yang mereka terima tidak secara langsung dapat mereka rasakan sepenuhnya.

## b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa peranan penting dalam membiayai semua pengeluaran pembangunan menurut DJP fungsi pajak sebagai berikut :

### 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Salah satu pendapatan terbesar negara merupakan pendapatan yang diambil dari pajak. Penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk menjalankan operasional sebuah pemerintahan dan dalam hal ini pemerintah menggunakan pajak sebagai pembiayaan rutin untuk membiayai biaya pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya, untuk pembiayaan pembangunan, yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Pembiayaan pembangunan yang juga semakin meningkat diharapkan berbanding lurus dengan penerimaan pajak pemerintah

### 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Pajak sebagai fungsi pengaturan dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, misalnya untuk memberikan berbagai insentif perpajakan guna mendorong penanaman modal dalam negeri dan asing serta untuk melindungi produksi dalam negeri pemerintah mengenakan bea masuk tinggi terhadap produk asing.

### 3) Fungsi Stabilitas

Pembiayaan pajak yang dimiliki oleh pemerintah digunakan sebagai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

### 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemungutan pajak yang dilakukan negara digunakan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara membuka kesempatan kerja dengan

cara menghimpun dana kepentingan umum yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### c. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2016) terdapat berbagai macam jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut Lembaga yang memungut :

#### 1) Menurut golongan

Golongan pajak dikelompokkan menjadi dua :

##### a) Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak dikenakan untuk wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

##### b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain maupun pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi ketika berlangsungnya transaksi atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak misalnya terjadi saat penyerahan barang maupun jasa

#### 2) Menurut sifatnya

Jenis Pajak menurut sifat dibedakan menjadi :

##### a) Pajak subjektif

##### b) Pajak objektif

#### 3) Lembaga pemungutnya

Menurut Lembaga pemungut yang berlaku di Indonesia :

##### a) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

b) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, guna membiayai rumah tangga daerah

d. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang telah dijelaskan oleh Resmi (2016) :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan fiskus untuk menentukan besaran pajak terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem ini inisiatif dan kegiatan perhitungan dan pemungutan pajak dilakukan sepenuhnya kepada aparat perpajakan.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini menghitung serta memungut pajak bergantung pada aparat perpajakan.

3) *With Holding System*

Pada system ini menentukan besaran pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3 Corporate Governance

*Forum for Corporate Governance* Indonesia (FCGI) 2012 mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menunjukkan cara manajer dalam mengatur operasional perusahaan, pengurus perusahaan, pemberi hutang, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, sehingga tercipta nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut Polimpung (2020) Konsep *GCG* sendiri sudah diterapkan di perusahaan Indonesia, namun belum semua perusahaan menerapkan *GCG* dengan benar atau efektif. Nilai tambah penggunaan mekanisme *GCG* Ini membuktikan bahwa tata kelola menambahkan perlindungan efektif bagi pemegang saham untuk memulihkan investasinya ke nilai semula dan tinggi. Hal ini yang mendasari terbentuknya prinsip prinsip dari *corporate governance* menurut Siti (2015) :

a. *Transparency* (Transparansi)

Untuk mewujudkan dan menjaga objektivitas dalam praktik bisnis mereka, perusahaan diharapkan mampu menyediakan informasi yang relevan dan material yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan dituntut bisa mempertanggungjawabkan kinerja dengan wajar dan transparan. Jadi, perusahaan harus pintar dalam mengatur kepentingan perusahaan sejalan agar bisa menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Akuntabilitas adalah salah satu syarat untuk memperoleh kinerja berkelanjutan.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan jangka panjang dan diakui sebagai perusahaan yang memiliki nama baik dalam mengelola perusahaan

d. *Independent* (Kemandirian)

Perlunya mendukung prinsip-prinsip GCG, perusahaan diharuskan mengatur perusahaannya secara independen oleh kekuasaan yang seimbang, sehingga tidak ada salah satu organ perusahaan yang mendominasi organ lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

e. *Fairness* (Kewajaran)

Perusahaan perlu untuk mengutamakan kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder* berdasarkan prinsip kewajaran

Penerapan "*Good Corporate Governance*" memiliki tujuan untuk menjaga kelangsungan operasional entitas, meningkatnya efektivitas kinerja dan lebih efisien dalam melakukan pekerjaan, serta maksimalnya penggunaan modal yang dimiliki perusahaan perlu menggunakan "Pedoman Mengelola Perusahaan yang Baik" sebagai dasar penerapan prinsip-prinsip perusahaan Indonesia. Pedoman tahun 2006 yang digunakan oleh Pedoman ini telah direvisi menjadi PER-01 / MBU / 2011 dan diterbitkan dalam PER-09 / MBU / 2012 pada Juli 2012 Sudah diperbaiki. (Assura, 2014)

Melalui Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) di Indonesia membuat ringkasan aturan yang diberikan sebagai salah satu standar acuan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006) yaitu adanya para pemilik saham, manajemen perusahaan RUPS, Dewan Komisaris, Dewan direksi, Sekretaris Perusahaan, dan *Stakeholders*. Penerapan *Corporate Governance* sesuai dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2012:23) menjelaskan empat manfaat yang diberikan jika suatu perusahaan maupun entitas dapat menerapkan *Corporate Governance* yang baik dan benar yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja manajemen dalam melakukan bisnis
- 2) Memberikan fasilitas pendanaan yang lebih mudah dan efisien
- 3) Memberikan rasa percaya dan iman kepada pemilik modal untuk
- 4) Memuaskan investor dalam menilai pekerjaan operasional perusahaan

Kontribusi tata kelola perusahaan yang baik dapat digunakan sebagai metode penting untuk meningkatkan kualitas proses bisnis melalui informasi yang dihasilkan dan perannya sebagai penggerak kinerja dan evaluasi kinerja. Pentingnya sistem pengelolaan perusahaan secara tertata tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Barat. Penerapan GCG diyakini akan berdampak lebih baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan persaingan bisnis antar perusahaan, menghindari *fraud* serta mencegah terjadinya kinerja yang buruk dan hal-hal lain yang dapat merugikan perusahaan. Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan serangkaian sistem yang mengatur, mengelola serta mengawasi pengendalian perusahaan agar dapat memenuhi tujuan perusahaan.

## **2.2 Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)**

GCG merupakan seperangkat sistem, pedoman dan tata cara bekerja yang diikuti dalam rangka memenuhi tujuan tertentu. Pelaksanaan GCG merupakan mekanisme yang didasarkan pada aturan, prosedur, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara semua pihak di perusahaan. Terdapat tiga elemen penting dalam mekanisme GCG yaitu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh lembaga internal perusahaan untuk memandu dan mengontrol (Herlina & Sofianty, 2020). Menurut Iskander & Chamlou (2000) menemukan bahwa mekanisme pemantauan tata kelola perusahaan terbagi dalam dua kategori, yaitu melalui mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal merupakan bentuk pengendalian perusahaan dengan berupaya mengendalikan perusahaan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi pengurus, dan rapat pengurus, sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara mempengaruhi perusahaan dari luar perusahaan, misalnya dengan melakukan penguasaan pasar. Penelitian ini menggunakan dua aspek mekanisme *corporate governance*, yaitu rasio struktur dewan komisaris independen, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional dan kualitas audit.

### 2.3 Kepemilikan Institusional

Saham institusional dapat diartikan sebagai saham yang dipunyai pihak entitas lain maupun institusi diluar perusahaan. Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki pihak institusi lain. Penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki lembaga tersebut terhadap total modal saham yang beredar. kepemilikan saham pihak institusional dapat menyebabkan peningkatan upaya pengawasan pemegang saham untuk mencegah perilaku oportunistik oleh eksekutif. (Jati, 2008). Menurut Ulupui & Diantari (2016) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengontrol manajemen secara efektif melalui proses *monitoring*, sehingga mengurangi langkah-langkah mencegah perilaku mementingkan diri sendiri oleh manajemen maka aktivitas pemegang saham yang lebih besar mampu membantu meningkatkan tindakan pengawasan terhadap tarif pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara mengintervensi dengan tujuan agar manajemen tidak mencoba meningkatkan kekayaan mereka sendiri.

### 2.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki manajemen perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Sugiarto (2011) kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana terdapat peran manajer didalam struktur modal perusahaan, dengan kata lain manajer tersebut berperan sebagai pemegang saham di perusahaan. *Agency Theory*, di dalam teorinya mengatakan terdapat ketidak sesuaian antara kepentingan *agent* dan *principal* dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan antar lini perusahaan yang disebut sebagai *agency conflict*. Perbedaan kepentingan antara beberapa pihak ini dapat terjadi jika dalam perusahaan terdapat adanya asimetris informasi, sehingga inilah pentingnya penerapan suatu mekanisme yang bertujuan untuk melindungi para pemegang saham. Perlunya melakukan *monitoring* terhadap pihak manajer menyebabkan timbulnya biaya yang disebut sebagai *cost agency*, dalam rangka

mengurangi adanya bias tersebut adalah dengan adanya kepemilikan saham manajer dalam perusahaan. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen yang rendah mengakibatkan adanya kecenderungan manajemen untuk berlaku *opportunistic*

*Agency theory* menyatakan peran manajer dalam bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan, yang akan dilaporkan kepada para pemilik saham perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Besarnya risiko dan tanggung jawab, mengakibatkan keinginan manajer untuk mendapatkan bonus yang sesuai. Oleh karena hal tersebut terdapat beberapa perbedaan kepentingan dalam perusahaan yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*) (Pramuka & Prasetyo, 2018).

## 2.5 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris di Indonesia ditunjuk oleh RUPS dan didalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris. Dewan komisaris independen memegang peranan penting dalam perusahaan sebagai upaya mengamati dan mempertanggungjawabkan laporan yang disajikan dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dewan komisaris. Dewan komisaris independen memiliki tugas sebagai pelaksana arah perusahaan, pengawasan manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Larasati, 2021). Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan kepada kelompok manajemen dalam perusahaan dengan tujuan untuk memastikan segala aktivitas pihak manajemen perusahaan demi tercapainya kepentingan perseroan, serta menggagalkan keputusan yang merugikan. Elemen penting yang akan kinerja dewan komisaris yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Praktik *corporate governance* mewajibkan perlunya komisaris independen dalam perusahaan yang dianggap dapat menguntungkan dan menciptakan iklim yang lebih independen, adil, dan setara

dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.

Struktur tata kelola perusahaan di Indonesia memisahkan dewan komisaris independen dari dewan direksi. Jumlah dewan komisaris independen yang direkomendasikan 30% dari total jumlah dewan komisaris yang dari perusahaan atau kalangan profesional. Beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris independen, yaitu:

- a. Tidak berafiliasi dengan siapapun dalam perusahaan
- b. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan .
- c. Tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.
- d. Tidak menjadi partner atau prinsipal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya.
- e. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan afiliasinya.
- f. Tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan afiliasinya, kecuali hanya sebagai komisaris independen.

## **2.6 Kualitas Audit**

*Audit quality* merupakan kemampuan auditor dalam menentukan pelanggaran dalam pelaporan keuangan klien dan melaporkan terjadinya kelalaian tersebut (Angelo, 1981). Kualitas audit bagi auditor adalah hasil dari pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang telah sesuai dengan pedoman dan etika profesi yang sudah ada. Bagi pengguna laporan keuangan, kualitas audit yang baik dapat memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dan bertanggung jawab atas laporan tersebut serta

memberikan pemahaman tidak terdapat kelalaian atau salah saji material. Menurut Tandiontong, (2017) audit yang berkualitas dapat terlihat dari :

- a. Orientasi Masukan yang meliputi penugasan personel KAP untuk melakukan mengatur, berkonsultasi, mengawasi, mengangkat, mengembakan promosi dan memeriksa.
- b. Orientasi Proses disini meliputi Independensi, kepatuhan pada standar audit, Pengendalian audit, dan Kompetensi auditor
- c. Orientasi keluaran meliputi kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan Kerjasama dengan klien

Audit yang berkualitas dapat memberikan dampak pengambilan keputusan pihak manajemen. Terdapat tiga standar auditing yang telah ditetapkan menurut IAI dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150) yaitu:

- 1) Standar umum
  - a) Audit dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan standar pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
  - b) Semua hal yang berhubungan dengan perkataan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
  - c) Pelaksanaan audit dan penyusunan laporan seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama
- 2) Standar Pekerjaan lapangan
  - a) Perencanaan dalam pekerjaan dilakukan semaksimal mungkin dan jika menggunakan asisten harus di supervisi dengan semestinya
  - b) Pemahaman yang memadai atas struktur intern perusahaan
  - c) Bukti audit yang diperoleh dengan cara pengajuan pertanyaan dan konfirmasi
- 3) Standar Pelaporan Auditing
  - a) Laporan auditor wajib menyattakan apakah laporan keuangan sudah sesuai standar dan prinsip akuntansi yang berlaku
  - b) Laporan auditor menunjukkan atau menyatakan ada atau tidaknya

ketidak konsistenan dalam penyusunan laporan keuangan

- c) Pengungkapan bersifat informatif memadai
- d) Laporan auditor memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan

Menggunakan jasa akuntan publik dapat menimbulkan rasa percaya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Audit yang baik dapat meningkatkan kepercayaan isi laporan keuangan sehingga dapat memberikan harapan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan dan kecurangan yang akan menguntungkan pihak manajemen sebagai pengambil keputusan perusahaan maupun investor sebagai pemilik modal yang berusaha menanamkan modalnya pada perusahaan.

### **2.7 Tax Avoidance**

Menurut Mardiasmo (2016) tindakan meminimalkan biaya pajak yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar hukum. Perusahaan biasanya melakukan ini dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Menurut Dyreng (2008) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, entah kegiatan yang diperbolehkan maupun kegiatan khusus yang dapat memberikan efek pengurangan nilai pajak. Tarif pajak agresif dapat dilakukan dengan berbagai macam hal. Merks (2007) mendefinisikan hal tersebut sebagai berikut :

- a. Menghilangkan atau meniadakan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang menyediakan kondisi pajak khusus atau rendahnya tingkat pajak (*tax haven country*) untuk jenis pajak tertentu (*substantive tax planning*)
- b. Melakukan usaha dalam melakukan mengurangi beban pajak dengan mencari peluang kelonggaran peraturan perpajakan dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)

- c. Salah satu cara melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara *transfer pricing*.

Pada dasarnya penghindaran pajak merupakan bagian dari pengelolaan perpajakan, sehingga merupakan pekerjaan untuk pengurangan pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dukungan terhadap praktik penghindaran pajak ditambah kondisi ekonomi yang semakin terbuka memberikan peluang dalam mengembangkan bisnis. Salah satunya adalah melakukan ekspansi bisnis dalam rangka persaingan ekonomi global yang semakin ketat. meningkatkan efisiensi pajak. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan masih di dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan berbagai macam kelemahan kelemahan undang-undang perpajakan

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

- 1) Unsur artifisial dimana pengaturan yang dilakukan seolah olah terlihat baik walaupun tidak terlihat baik, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak
- 2) Celah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan (*loophole*) digunakan untuk menerapkan peraturan yang legal untuk berbagai tujuan, padahal semestinya bukan hal tersebut yang dimaksudkan.
- 3) Kerahasiaan dalam bentuk rencana, hal ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan. (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991)

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini digunakan dengan tujuan dalam rangka mencari pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance*, kualitas audit dan *tax avoidance* yang pada perusahaan sektor industri pada Bursa Efek Indonesia. Berbagai penelitian sudah dilakukan banyak peneliti yang menaruh perhatian tentang hubungan antara mekanisme *Corporate Governance* dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Sebagian besar penelitian tersebut mengungkapkan bahwa keterlibatan mekanisme dan faktor faktor *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Septiadi et al (2017) dilakukan dengan menggunakan perusahaan sektor pertambangan dan pertanian terdaftar dalam BEI tahun 2013-2015. Variabel dalam penelitian yang digunakan adalah manajemen laba, *corporate governance* dan CSR terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai proksi dari *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016) menyatakan bahwa komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh. Terdapat perbedaan penelitian sejenis mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* oleh Sunarsih dan Oktavia (2016) mengungkapkan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun kepemilikan Institusional tidak berpengaruh.

Penelitian lain yang berasal dari Sunarsih & Handayani (2018) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdapat pada BEI pada tahun 2012-2015 variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan terhadap pengaruh penelitian sebelumnya yaitu kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan hasil variabel lain menunjukkan jika dewan komisaris independent, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional juga berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Subagiastra et al (2017) menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional dan juga dewan komisaris independen hasilnya berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara komite audit dan juga kualitas audit perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang berbeda dimana Saputra et al (2018) dalam penelitiannya terhadap perusahaan BUMN menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016) menunjukkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat menjadi patokan dalam melakukan pengawasan keputusan yang diambil. Variabel lain yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang menjadi indikasi jika kemampuan manajerial, dewan komisaris independen dan kualitas audit mampu menjadi alat pengendali dalam mengawasi kinerja manajemen. Hasil penelitian lain oleh Fauzan et al (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional mampu berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan jika kepemilikan saham tersebut mampu menjadi alat pengendalian dalam keputusan perusahaan dalam keputusan pajak. Variabel lain dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Setyawan et al (2019) dalam penelitiannya, membahas factor-faktor yang membahas pengaruh kebijakan keuangan dan *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI Tahun 2016-2017. Penelitian ini menggunakan variabel yang hampir sama dengan yang peneliti teliti, diantaranya agresivitas pajak, kepemilikan institusional, komisaris independen dan kualitas audit. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Periode penelitian yang digunakan 2016-2017 sedangkan periode yang peneliti gunakan adalah tahun 2018-2020. Hasil penelitian tersebut berupa komisaris independent berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh.

Ringkasan atas hasil peneliti terdahulu tersebut dapat menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan hasil dari setiap penelitian terdahulu. penelitian ini dikerjakan guna mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* dimana di dalam mekanisme *Good Corporate Governance* diprosikan sebagai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan kualitas audit pada perusahaan sektor industri terdaftar di BEI. Berikut merupakan beberapa acuan penelitian terdahulu yang digunakan penelitian ini :

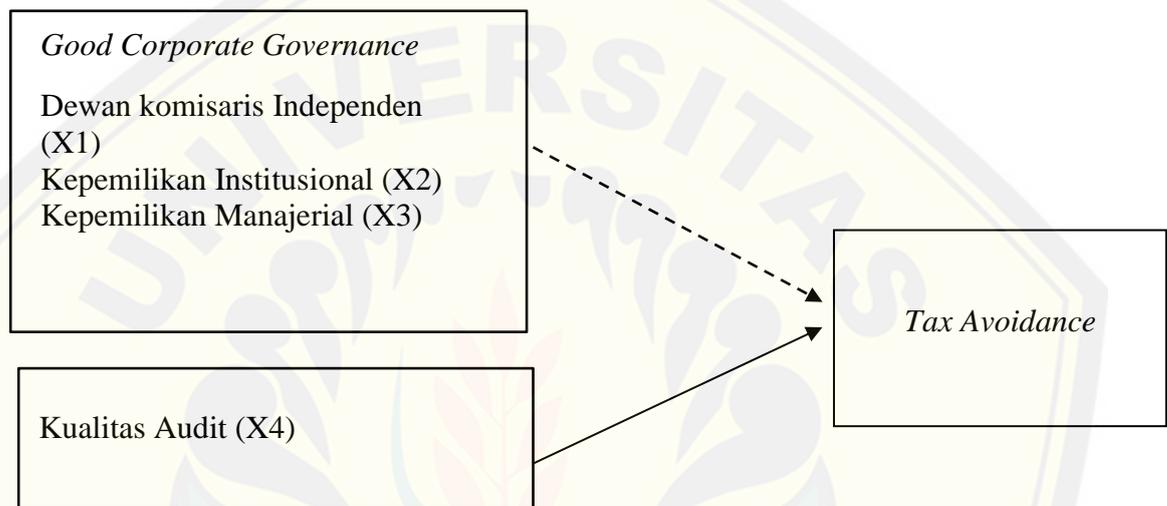
**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Septiadi et al (2017)	Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan dalam pengawasan dan pengendalian dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Subagiastra et al (2017)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bawa komisari independent dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , semakin tinggi proporsi komisaris independent dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi <i>tax avoidance</i> . Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Maraya dan Yendrawati (2016)	Hasil penelitian menunjukkan jika Kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , hasil tersebut menunjukkan jika penggunaan auditor <i>big four</i> dan kepemilikan institusional mampu menjadi alat pengendali dalam mengendalikan perilaku penghindaran pajak perusahaan, sementara proporsi komisaris

		independent dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Sunarsih dan Oktavia (2016)	Hasil penelitian menunjukkan jika proporsi komisaris independent, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Fauzan et al (2021)	Hasil penelitian menunjukkan jika kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , yang menunjukkan jika kepemilikan saham oleh pihak institusional dan manajerial akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan keputusan dalam perusahaan, sementara proporsi komisaris independent tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>
6	Andriyani dan Mahpudin (2021)	Hasil penelitian menunjukkan jika komisaris independent dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Saputra et al (2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independent dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Hal ini menjadi indikasi komisaris independent dan kualitas audit perusahaan tidak menentukan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan <i>tax avoidance</i> .
8	Setyawan et al (2019)	Hasil penelitian menunjukkan jika komisaris independent berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , yang berarti semakin tinggi proporsi komisaris independent akan menurunkan perilaku penghindaran pajak perusahaan, namun kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Gunawan et al (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan jika komisaris independent berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , namun kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Sunarsih dan	Hasil penelitian menunjukkan jika komisaris

	Handayani (2018)	independent, kepemilikan manajerial dan kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , namun kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>
--	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.9 Kerangka Konseptual



**Gambar 2. Kerangka Konseptual**

Bersumber dari kerangka konseptual yang sudah peneliti buat, maka tujuan peneliti akan membahas faktor faktor mekanisme *corporate governance* dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* terhadap perusahaan yang merupakan bagian BEI sektor aneka industri. Proksi yang terkait *corporate governance* diantaranya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan juga kualitas audit. Beberapa faktor tersebut merupakan variabel independen sementara *tax avoidance* merupakan variabel dependen.

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian dengan tujuan mencari pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* memiliki hasil yang beragam. Semakin besar ukuran dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan akan semakin mengakibatkan rendahnya tingkat tarif pajak agresif dalam perusahaan. Hal itu menunjukkan adanya pengaruh *agency problem*, dimana semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan

Menurut Komang et al (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hasil tersebut menunjukkan pengaruh yang diberikan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen yang ada dalam suatu perusahaan maka *monitoring* terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan akan semakin efektif. Hasil penelitian lain oleh Andriyani dan Mahpudin (2021) menunjukkan hasil yang sama dimana komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun penelitian sejenis milik Maraya dan Yendrawati (2018) menunjukkan hasil yang berbeda dimana komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

berdasar dari temuan empiris maka peneliti menemukan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan dengan banyaknya jumlah dewan komisaris independen pengawasan akan semakin besar dan manajemen berhati hati dalam mengambil keputusan, sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan.

**H1 : Dewan Komisaris Independen Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

### 2.10.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Perspektif konflik agensi menjelaskan untuk mengurangi permasalahan agensi adalah adanya kepemilikan oleh institusional sebagai pengendali manajemen untuk proses monitoring secara efektif dan mengurangi tindakan manajemen laba. Tingginya tingkat saham yang dimiliki oleh pihak institusional dapat mempengaruhi keputusan manajemen sehingga memberikan dampak peningkatan pekerjaan manajemen (Prahesti & Abudanti, 2015).

Menurut Setiadi et al (2017) dalam penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* menyebutkan jika kepemilikan saham pihak institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian sejenis milik Setyawan et al (2019) menunjukkan hasil yang sama yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan semakin besar atau kecil kepemilikan institusional belum mampu menjadi alat *monitoring* yang efektif bagi perusahaan sehingga tidak dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dan mengurangi peluang terjadi penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Amin, et al (2020) menyebutkan jika kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian serupa milik Subagiastra et al (2017) memiliki hasil yang sama yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.. Hal ini membuktikan jika kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional atau pihak luar tinggi maka dapat menjadi alat pengawasan yang dalam mengawasi kinerja manajemen dalam upaya melakukan *tax avoidance* karena dalam perspektif konflik agensi bahwa permasalahan agensi dapat dikurangi dengan adanya kepemilikan institusional.

### **H2: Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance***

### **2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Menurut M penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Handayani (2018) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian tersebut menurut Charisma & Dwi mulyani (2019) dan Fauzan et al (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan jika semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial maka nilai *etr* akan tinggi yang berarti penghindaran pajak rendah, sehingga manajemen akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perusahaan yang akan diterapkan agar kebijakan yang telah diambil tidak berdampak buruk bagi para pemegang sahamnya, termasuk dalam upaya penghindaran pajak dimana didalamnya memberikan resiko untuk perjalanan perusahaan kedepan. Manajemen perusahaan yang memiliki saham perusahaan dimungkinkan untuk lebih dapat memberikan pengendalian dan pengawasan serta memiliki hak suara dalam menentukan arah perusahaan terutama dalam hal pajak.

Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh septiadi et al (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, hasil penelitian tersebut menjadi indikasi bahwa kepemilikan saham manajerial yang cenderung belum mampu menjadi alat untuk mengendalikan perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2018) menunjukkan hasil yang serupa yaitu kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **H3: Kepemilikan Manajerial Pada Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan**

### **2.10.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Auditor yang baik mampu menerapkan dan memiliki keahlian serta berintegritas akan cenderung mempertahankan reputasinya, dengan cara

melakukan pekerjaan dengan baik dan mempertahankan kualitas suatu audit tersebut. Laporan audit yang diaudit oleh KAP *big four* sering kali dinilai lebih dipercata dan berkualitas sehingga menampilkan nilai sebenarnya perusahaan (Septiadi et al 2017)

Menurut Maretta et al (2019) dan juga Sunarsih & Handayani (2018) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kualitas suatu audit yang diaudit oleh KAP *big four* akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan dengan kualitas audit yang baik akan melakukan *tax avoidance* yang relatif rendah, sehingga pembayaran pajak perusahaan relatif besar sesuai dengan laba perusahaan yang diperoleh dan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin kecil. Hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Saputra et al (2018) dan Andriyani dan Mahpudin (2021) yang mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**H4: Kualitas Audit Pada Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance***

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan dengan metode positivism, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan instrumen penelitian menggunakan pengumpulan data, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk dapat menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Indriantoro et al (2014) penelitian kuantitatif merupakan pengujian melalui berbagai teori dengan ukuran variabel penelitian angka-angka & analisa statistika. Kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan deduktif sebagai tujuan hipotesisnya..

### 3.2 Jenis dan Sumber data

Peneliti mengambil data sekunder dengan bukti, catatan historikal yang disusun. Peneliti mengambil data berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor aneka industri BEI dari 2018 - 2020. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan cara dokumentasi dengan mengumpulkan data kuantitatif yang dan dapat dilaksanakan menggunakan cara melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui sumber [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) ataupun melalui LPK perusahaan yang akan menjadi penelitian dari 2018 - 2020

### 3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi perusahaan yang terdaftar di BEI sektor aneka industri yang menerbitkan laporan keuangan serta membayar pajak selama periode penelitian berlangsung 2018 - 2020. *Sample* dipilih dengan mengambil teknik *purposive sampling*. Sugiyono, (2016) menjelaskan *purposive sampling* adalah teknik yang dipakai untuk mempertimbangkan sesuatu. Digunakan agar

lebih spesifik, jadi, perusahaan yang menjadi sampel harus memenuhi karakteristik yaitu :

- a. perusahaan terdaftar dalam BEI sektor Industri untuk periode 2018-2020 secara berturut-turut
- b. perusahaan penerbit LK tahun 2018-2020
- c. LK per tahun yang penyajiannya dalam Rupiah
- d. perusahaan yang profit selama tahun pengamatan agar lebih mudah untuk penghitungan penghindaran pajak ETR

### **3.4 Variabel Penelitian dan Pengukurannya**

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependensi & variabel independensi. *Tax avoidance* merupakan dependen variabel penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemilik institusional, pemilik manajerial, DKI, dan kualitas audit. Variabel tersebut dapat dilihat keterkaitannya dalam perilaku meminimalkan pajak dan penghindaran pajak perusahaan.

#### **3.4.1 Tax Avoidance**

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel independen. Variabel dependensi penelitian ini yaitu *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan prosedur perusahaan dalam menghindari pajak. Menurut Mardiasmo (2016) penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dan tidak melanggar hukum, perusahaan mampu melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Ratmono & Sagala (2015) nilai ETR yang lebih sedikit menunjukkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini kemudian ditunjukkan dengan indikator tingginya *tax agresif* dan rendahnya nilai ETR atau 0 sehingga perusahaan cenderung agresif terhadap pajak. perusahaan yang mengurangi beban pajak tersebut untuk mengupayakan profit keuangan cenderung memiliki ETR rendah.

Pengukuran variabel :

Pengukuran untuk variabel menggunakan metode *Cash Effective Rate*, ini adalah *cash* sebagai *cost* untuk *tax* dibagi *profit before tax*, jika ETR membesar menunjukkan rendahnya penghindaran tax. Rumus CETR adalah :

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Penghasilan sebelum pajak}}$$

### 3.4.2 Kepemilikan *Institusional*

Variabel kepemilikan institusi adalah pemilik saham perusahaan dari anggota external perusahaan bisa dari institusional/lembaga, bank, perusahaan investasi serta institusi yang lainnya. Penelitian kali ini pemilik institusi diukur melalui membandingkan total saham investor institusional atau lembaga maupun lembaga dengan total saham yang beredar di perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian Avianita & Fitria (2020) rumus pemilik institusi sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah Saham Pihak Institusional}}{\text{jumlah Saham Beredar}}$$

### 3.4.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial merupakan total pemilik saham korporasi anggota manajerial yang dikelola perusahaan oleh Dewan Komisaris atau Direksi, kemudian anggota manajerial sebagai pengatur dalam perusahaan. Berdasarkan Avianita & Fitria (2020) rumus kepemilikan manajerial yaitu :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah Saham manajemen}}{\text{jumlah Saham Beredar}}$$

### 3.4.4 Komisaris Independen

Komisaris independensi adalah elemen dewan komisaris diluar perusahaan. Menurut peraturan BEI persentase dewan komisaris independen perusahaan adalah 30%. Variabel itu diukur dengan persentase total dewan komisaris atas jumlah komisaris kalangan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independensi yang rumusannya adalah menurut Ubaidillah, (2021) :

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

### 3.4.5 Kualitas Audit

Terdapat dua jenis kantor akuntan publik adalah KAP disebut sebagai *The Big Four* & KAP kecil di sebut *Non Big Four*. KAP dalam kategori *big four* mempunyai quality audit unggul dan fokus terhadap proteksi *reputable company*. Perusahaan yang memilih untuk di audit oleh *The Big Four* terdapat kemungkinan untuk kepercayaan pelanggan atas kredibiliti LPK dalam komparasi dengan auditor *non big four* dikarenakan kualitas suatu audit yang mereka punya. Negara ini mempunyai 4 KAP dalam kategori *big four* yaitu :

- a. Kantor akuntan publik Deloitte Touche Tohmatsu, bekerjasama dengan KAP Drs. Hans Tuanakotta & Mustofa, Osman Bing Satrio dan Rekan.
- b. Kantor akuntan publik Pricewaterhousecoopers, bekerjasama dengan KAP Drs. Haryanto Sahari dan Rekan, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
- c. Kantor akuntan publik Ernst dan Young, bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
- d. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), bekerjasama dengan KAP Sidharta & Widjaja.

Penelitian ini mengambil variabel dummy, jika perusahaan dalam penelitian menggunakan jasa auditor *big four* di Indonesia ditandai nilai variabel *dummy*, 1 (satu) kemudian perusahaan yang tidak menggunakan KAP *big four* maka ditandai dengan 0 (nol).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara menghimpun data, data diambil dari dokumentasi dan diperoleh data dari perusahaan juga yang termasuk ke dalam BEI sektoral industri , lalu mengakses laporan keuangan perusahaan terdaftar tersebut dan pengumpulan data penting lainnya.

### 3.6 Metode Analisis Data

penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dan menggunakan program *Statistical Package For Social Sciences* (SPSS) sebagai alat untuk menguji data. Berikut langkah yang diambil *researcher* dalam analisa data adalah :

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menginterpretasikan hasil data berdasarkan mean, standarisasi deviasi, varians, maximum dan minimal dan dijelaskan dalam bentuk angka (Ghozali, 2016:19). Variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini antara lain *tax avoidance*, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kualitas Audit.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik sebagai penilaian layaknya sebuah model regresi (Ghozali, 2016) Uji asumsi klasik penting sebagai langkah mendapatkan hasil jika data tersebut layak dipakai analisa, dengan alasan seluruh data yang tidak dapat dipakai untuk analisa regresi. penelitian ini megambil empat metode uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi & uji heteroskedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) Uji Normalitas digunakan sebagai penguji apakah model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi yang normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Normalitas ada jika hasil uji kolmogorov smirnov lebih rendah daripada 0,05.

##### b. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dipakai sebagai penguji regresi ditemukan berkorelasi dengan variabel lepas (independen) (Ghozali, 2016). Nilai variabel

independensi yang menghasilkan *incorelation* dapat dikatakan model regresi adalah baik. Menentukan skala pengujian multikolinieritas untuk sebuah model mungkin terlihat apabila nilai *variance inflation factor (VIF)* kurang dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,1, maka model dikatakan bebas multikolinieritas. (Ghozali, 2009).

c. Uji Autokorelasi

Berdasarkan Gozali, (2011) jika suatu data berurutan selama waktu akan mempunyai hubungan dengan yang lainnya dan sebagai alasan adanya autokorelasi. Uji autokorelasi sebagai langkah mengetahui adanya salah pengganggu antar periode sebuah regresi dan korelasi dengan yang lainnya. Sebuah model regresi sendiri bisa dinyatakan bermasalah saat model regresi saling memiliki autokorelasi. Uji *Run test* digunakan untuk menguji adanya kesalahan pengganggu yang terjadi secara random atau acak. Pengujian *run test* dapat dikatakan data normal apabila memiliki hasil residual acak atau random maka tidak ada problem autokorelasi saat uji data atau yang lainnya.

d. Uji Heteroskedastisitas

Berdasar Ghozali, 2018 tujuan menggunakan pengujian heteroskedastisitas adalah untuk uji model regresi sebagai langkah melihat adanya ketidak seimbangan varian residu dalam observasi dengan observasi lain. Peneliti menggunakan Uji Heteroskedastisitas dengan uji Glesjer yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, apabila *value signifikansi*  $> 0,05$  maka model regresi tersebut tidak ada heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011)

### 3.6.3 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis analisa regresi ganda sebagai langkah untuk mendapatkan pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan SPSS sebagai asumsi relasi antar variabel independensi dan

dependen. Uji tiap hipotesis digunakan sebagai uji tiap koefisiensi regresi untuk uji t. Uji penelitian ini sebagai bukti signifikansi perumusan hipotesis.

Rumus persamaan regresi adalah :

$$= \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_4$  = Koefisien Regresi

X1 = Komisaris Independen

X2 = Kepemilikan Institusional

X3 = Kepemilikan Manajerial

X4 = Kualitas Audit

e = error

#### a. Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Menurut (Ghozali, 2018:97) Uji F bertujuan untuk menguji variabel independen apakah mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji model yang digunakan (*fit* atau tidak) penentuan nilai f dinilai layak atau tidak memiliki kriterianya sebagai berikut :

- a. Saat nilai uji  $< 0,05$  maka Model dalam penelitian ini layak untuk dipakai
- b. Saat nilai uji  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Model tidak baik dipakai.

#### b. Uji Signifikan Parameter Individual

Uji signifikansi parsial (uji t) digunakan dalam rangka menentukan kekuatan pengaruh suatu variabel independen dengan individu untuk menjelaskan variabel dependen. Hipotesis 0 ( $H_0$ ) diuji apakah parameter cocok

dengan nol yang artinya apakah variabel independen tidalkan tepat sebagai penjelas variabel dependen. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) parameter sebuah variabel bukan 0 yang artinya variabel itu menjelaskan signifikansi terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan mencari pengaruh variabel, komisaris independen, pemilik institusi, manajerial dan *quality of audit* terhadap *tax avoidance*. Analisis regresi seperti koefisiensi dari tiap variabel independen dan hasil koefisiensi digunakan untuk prediksi nilai variabel dependen pada sebuah persamaan.. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan pengujian probabilitas dengan tingkat kepercayaan yang dipakai yaitu 95% atau taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan karakteristik yaitu :

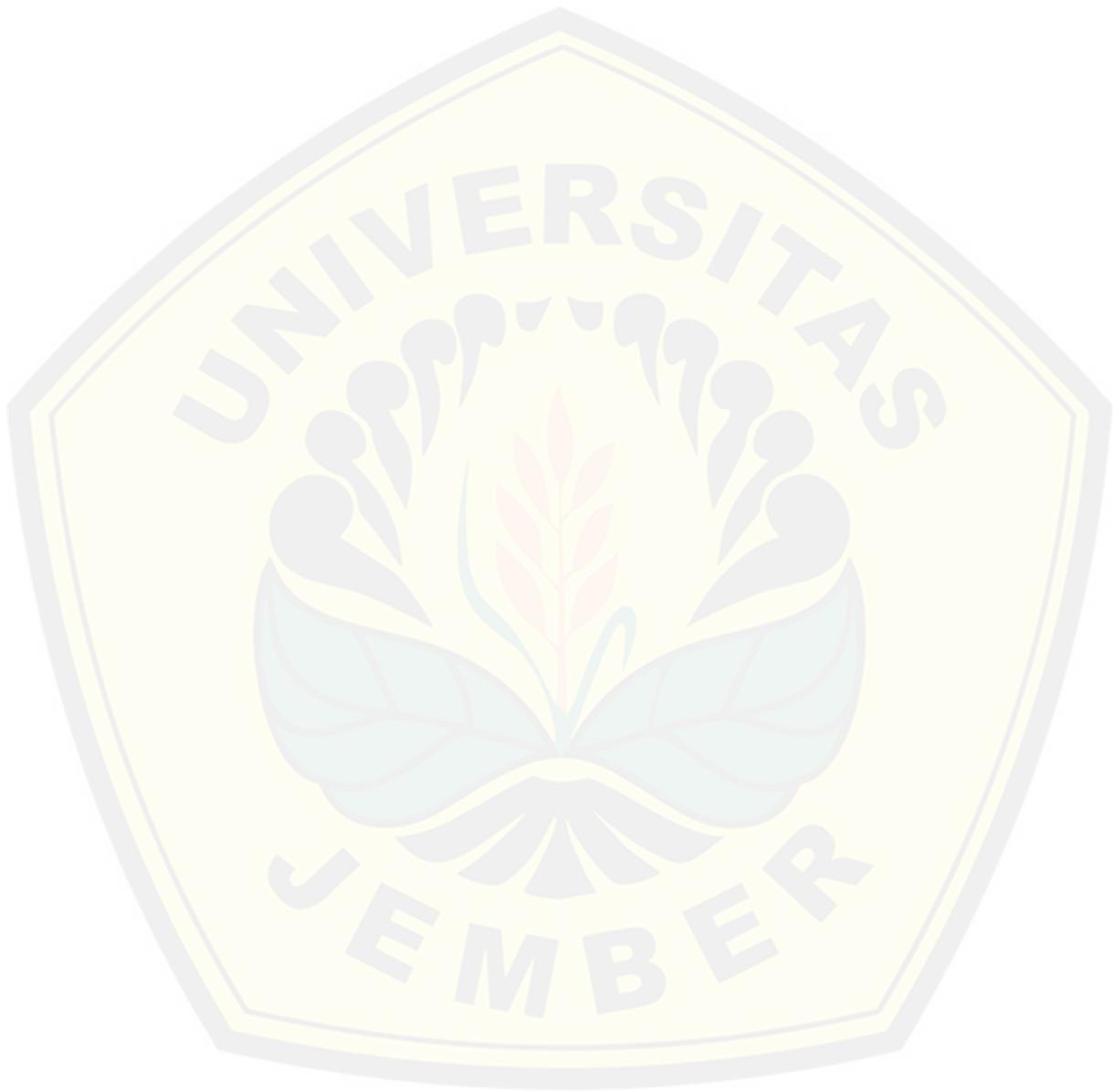
- a) Saat value signifikansi kurang dari  $< 0.05$  maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap dependennya atau  $H_0$  diterima
- b) Jiika value signifikansi lebih dari  $> 0.05$  maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap dependennya atau  $H_0$  ditolak
- c. Uji Koefisien Determinan

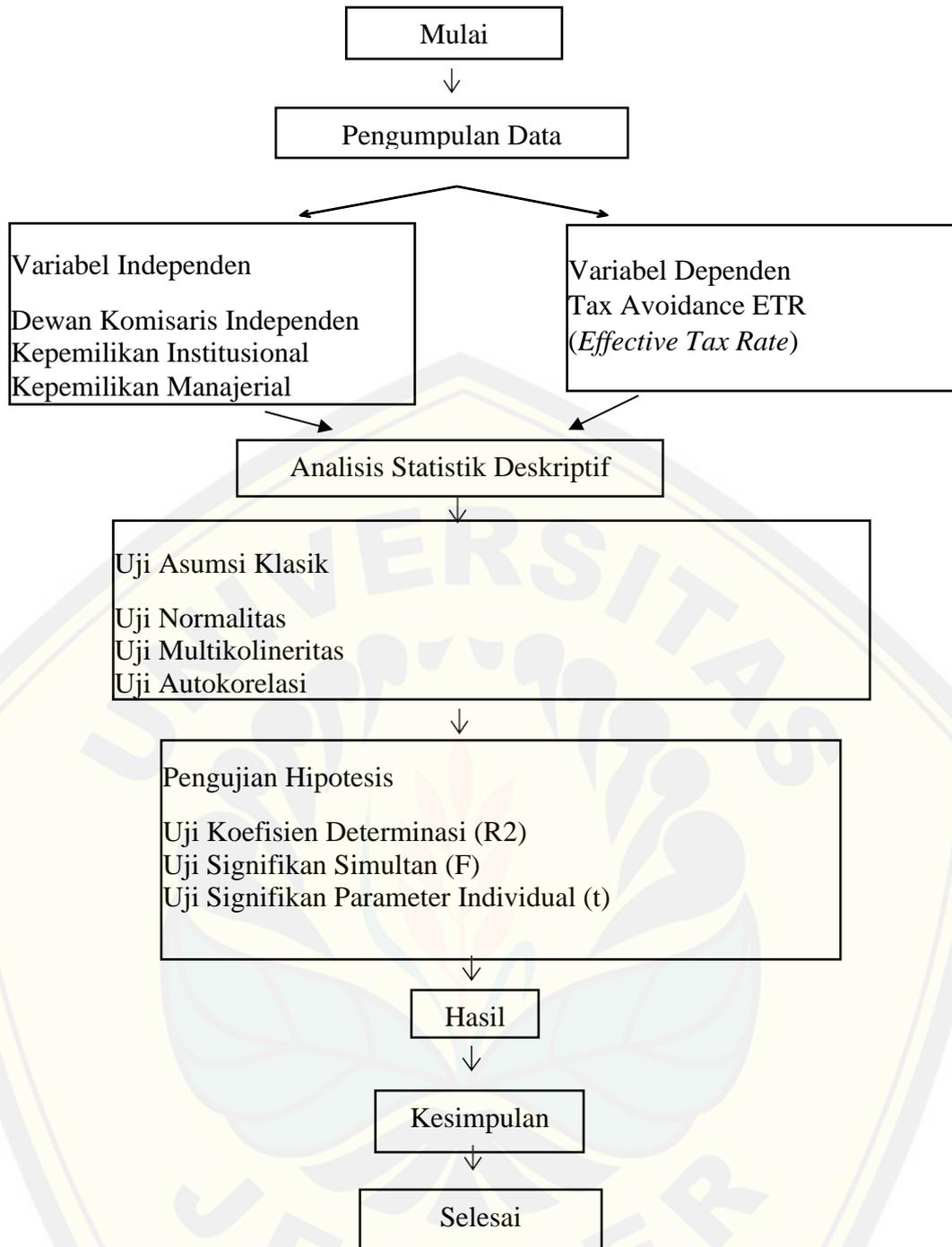
Koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk aturan jauhnya kemampuan model sebagai penjelas varian variabel dependent. nilai koefisiensi determinan dapat 0 atau 1. Hasil dari Nilai  $R^2$  cenderung sedikit memiliki arti kemampuan variabel independen sebagai penjelas variabel dependent cukup dibatasi, namun apabila hasil nilai  $R^2$  hampir 1 dapat dikatakan variabel independen membuat seluruh informasi yang dipakai sebagai prediksi variabel dependent (Ghozali, 2011).

### 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Rerangka solusi masalah adalah elemen tiap-tiap langkah penelitian yang dilakukan. Hal ini untuk mendapatkan tahap sistematika secara efisien mendapatkan hasil penelitian yang unggul dan adanya urutan langkah

penelitian dengan tepat. Berikut kerangka pemecahan masalah terdapat pada Gambar 3.1 :





Gambar 3.1

Kerangka Pemecahan Masalah

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Sampel

Penelitian sekunder kali ini menggunakan data yang diperoleh melalui BEI yaitu ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta *website* perusahaan. Sebagai objek dari penelitian ini yaitu perusahaan pada sektor Industri. Penelitian ini menggunakan populasi data yang merupakan perusahaan sektor industri dan terdaftar dalam BEI pada Tahun 2018-2020. Sampel penelitian yang menggunakan metode dengan cara *purposive sampling*. Kriteria yang dipakai dalam menentukan *sample* terkait dan berikut merupakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yaitu :

**Tabel 4.1 Kriteria Sampel**

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	perusahaan terdaftar sektor aneka Industri BEI	54
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan di BEI tahun 2018-2020	(8)
3	Laporan keuangan tidak disajikan dengan menggunakan mata uang Rupiah	(10)
4	perusahaan mengalami kerugian selama tahun berjalan sesuai penelitian	(15)
5	Jumlah sampel Perusahaan	21
6	Jumlah sampel tahun penelitian (2018-2020) (21*3)	63

Perusahaan yang masuk sampel dalam penelitian ini berjumlah total dua puluh satu perusahaan penelitian ini terdapat beberapa perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel sehingga harus dikeluarkan dari dalam sampel. Sampel perusahaan untuk penelitian yaitu dua puluh satu perusahaan, sampel itu terus secara berkelanjutan dimasukkan dalam periode penelitian dan

telah mengungkapkan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Penelitian ini meneliti total sampel sejumlah 63 yang terdiri dari 21 perusahaan yang berturut turut selama 3 tahun dan mengungkapkan laporan keuangannya

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Mengacu hasil statistik deskriptif didapatkan total 63 data telah diobservasi dari hasil kurun waktu 3 tahun (2018-2020) diperoleh 21 perusahaan yang dijadikan sampel. Berikut merupakan hasil dari pengolahan data statistic deskriptif :

**Tabel 4.2 Hasil Statistika Deskriptif**

<b>Variael Penelitian</b>	<b>Minimal</b>	<b>maximum</b>	<b>Rata rata</b>	<b>Standar Deviasi</b>
Komisaris Independen (X <sub>1</sub> )	0,25	0,75	0,4020	0,11259
Kepemilikan Institusional (X <sub>2</sub> )	14,01	92,46	63,6892	20,97616
Kepemilikan Manajerial (X <sub>3</sub> )	0,00	45,47	6,0408	12,74027
Kualitas Audit (X <sub>4</sub> )	0,00	1	0,2540	0,43878
Tax Avoidance	0,02	0,94	0,2700	0,14643

Sumber : Lampiran dua

berdasarkan tabel 4.2 disimpulkan hasil dari statistika deskriptif. Hasil analisis diketahui hal-hal berikut ini :

- a. Komisaris Independen mempunyai nilai minimal sebesar 0,25 yang menggambarkan jumlah proporsi komisaris independen hampir memenuhi ketentuan aturan yang ditetapkan oleh BEI, sedangkan dengan nilai maksimal adalah 0,75 yang artinya jumlah persentase dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan mencapai nilai yang hampir maksimal. Rerata komisaris independen dalam perusahaan sektor industri terdaftar dalam BEI sebanyak 40% yang berarti rata-rata telah memenuhi ketentuan aturan yang telah diterbitkan oleh BEI adalah perusahaan wajib memiliki

dewan komisaris independen minimum 30% serta *standart deviation* 0,11259

- b. Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai minimal sebesar 14,01 yang artinya kepemilikan institusional paling kecil dalam perusahaan adalah sebesar 14,1, sedangkan nilai maksimal 92,46 yang berarti jumlah maksimal kepemilikan institusional tertinggi berada pada nilai 92,46. Rata rata nilai kepemilikan institusional adalah sebesar 63,68 yang berarti rata rata perusahaan sektor industri terdaftar pada BEI mempunyai kepemilikan institusional sebesar 63,68 dan nilai standar deviasi nya 20.97616
- c. Kepemilikan Manajerial mempunyai nilai 0 yang artinya ada perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial sama sekali sedangkan nilai maksimal adalah 45,47 yang berarti kepemilikan saham manajerial tertinggi berada di angka 45,47%. Rata rata nilai kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan sebesar 6,0408 serta nilai standar deviasi nya 12.74027
- d. Kualitas Audit memiliki nilai minimal 0 yang artinya pada perusahaan terkait penelitian ada yang tidak diaudit KAP *The Big Four* sedangkan nilai maksimal 1, yang memiliki arti bahwa beberapa perusahaan dalam penelitian ini menggunakan jasa auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*. Hasil pengolahan data mendapati 6 perusahaan yang ada dalam 3 periode yang dimulai tahun 2018-2020 di audit oleh KAP *big four* sementara sisanya menggunakan jasa auditor independen yang lain. Rata rata nilai kualitas audit 0,25 dan standar deviasi nya 0,43878
- e. *Tax Avoidance* mempunyai nilai minimal 0,02 sedangkan nilai maksimal adalah 0,94 dengan rata rata sebesar 0,27 dan memiliki standar deviasi 0,16463. Hasil ini menunjukkan kecil atau besar taksiran penghindaran tax oleh perusahaan..

### 4.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji sebagai penentu apa suatu variabele dependen, independen mungkin keduanya berdistribusi normal, mendekati normal

atau tidak. Menurut Ghozali (2011) ada 2 cara memahami normalnya distribusi suatu model pengujian. Tabel ini adalah hasil pengujian normalitas :

**Tabel 4.3 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov**

Variabel	Nilai <i>kolomogorov smirnov</i>	Penjelasan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,210	normal

Sumber : Lampiran 2

hasil uji ini didapatkan jika nilai atau value sig(2-tailed) menunjukkan angka 0,0210 yang berarti lebih besar dari pada 0,005. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.3.1 Uji Multikolinieritas

berdasarkan Ghozali (2016) pengujian multikolinieritas adalah sebagai suatu uji yang digunakan sebagai deteksi atas korelasi variabel bebas dan variabel kontrol dalam penelitian. Data penelitian dianggap layak untuk dipakai apabila ada korelasi variabel bebas dan terikatnya. Teknik penilaian multikolinieritas suatu data yaitu tentang pengamatan variabel independent value matrix korelasi. Tabel ini adalah hasil pengujian multikolinieritas

**Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Komisaris Independen (X <sub>1</sub> )	0,849	1,178	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepemilikan Institusional (X <sub>2</sub> )	0,579	1,726	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepemilikan Manajerial (X <sub>3</sub> )	0,558	1,792	Tidak terjadi multikolinieritas

Kualitas Audit ( $X_4$ )	0,899	1,113	Tidak terjadi multikolinieritas
--------------------------	-------	-------	---------------------------------

Sumber : Lampiran 2

Data dalam sebuah penelitian dikatakan tidak mengalami gejala multikolinieritas jika value *tolerance* lebih besar 0,10 serta nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.4 menunjukkan jika masing masing variabel terdapat nilai *tolerance* lebih besar dari nilai minimum 0,10 serta VIF yang lebih kecil dari 10,00, artinya adalah variabel independen penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas

#### 4.3.2 Uji Autokorelasi

Berdasarkan Ghozali (2011) penelitian memiliki data berurutan sepanjang waktu dan keterkaitan dengan yang lain adalah faktor adanya data autokorelasi. Uji ini sebagai alat melihat apakah diantara kesalahan pengganggu period  $t$  dan sebelumnya disatu regresi linear mempunyai korelasi. Sebuah data bermasalah jika memiliki korelasi. Berikut merupakan hasil pengujian autokorelasi yaitu :

**Tabel 4.5 Uji Autokorelasi**

Variabel	Nilai <i>Run Test</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,702	Tidak Terdapat autokorelasi

Sumber : Lampiran 2

Hasil penelitian uji autokorelasi menggunakan *run test* pada tabel 4.5 menghasilkan besarnya nilai 0,702. Berdasarkan hasil pengujian tersebut ditarik kesimpulan bahwa dari *run test* dengan besarnya signifikan  $0,702 > 0,05$ . Hal tersebut menghasilkan tidak ada gejala autokorelasi.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian menggunakan uji heteroskedastisitas tujuannya untuk melakukan uji jenis regresi yang mungkin ada ketidaksamaan varians residu suatu observasi dengan yang lainnya, kemudian suatu varians residu suatu observasi dengan yang

lainnya dinamai sebagai homoskedastisitas, jika berbeda baru akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik apabila tanpa mengalami gejala heteroskedastisitas Ghozali (2013). Hasil pengujian heteroskedastisitas dan uji glejser mendapatkan hasil yaitu antara lain :

**Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser**

Variabel	Nilai <i>Signifikan</i>	Keterangan
Komisaris Independen	0,326	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
Kepemilikan Institusional	0,090	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
.Kepemilikan Manajerial	0,185	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
Kualitas Audit	0,954	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 2

Uji Glejser ini dilakukan dan mendapatkan hasil semua *variable independent* mendapatkan nilai signifikansi  $> 0,05$  atau lebih besar dari  $0,05$  dan dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model ini.

#### 4.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dengan regresi linier berganda. *Tax avoidance* adalah variabel dependen yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Ratio* (ETR), sedangkan variabel independen terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit. Hasil analisa regresi linear berganda terhadap hipotesis penelitian ditulis dalam tabel 4.7 berikut ini :

**Tabel 4.7 Hasil Analisa Regresi Variabel Koefisien**

<i>Variable</i>	<b>Koefisiensi Regresi</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
Konstanta	0,218	-	-
Komisaris Independen (X <sub>1</sub> )	0,016	0,928	Tidak Berpengaruh
Kepemilikan Institusional (X <sub>2</sub> )	0,050	0,664	Tidak Berpengaruh
Kepemilikan Manajerial (X <sub>3</sub> )	0,004	0,032	Berpengaruh
Kualitas Audit (X <sub>4</sub> )	-0,032	0,459	Tidak Berpengaruh

Sumber : Lampiran 3

Persamaan regresi didapatkan berdasarkan tabel yaitu :

$$Y = 0,218 + 0,016 X_1 + 0,50 X_2 + 0,004 X_3 - 0,032 X_4 + e$$

#### 4.4.1 Uji F

Pengujian f dalam penelitian ini merupakan *goodness of fit* atau kelayakan model regresi, yang menentukan apakah suatu model yang dipakai pada penelitian ini layak atau tidak untuk dijadikan sampel. Model tersebut akan layak apabila nilai signifikansi tidak lebih dari 0,05. Hasil uji ini ada pada tabel 4.8:

**Tabel 4.8 Hasil Uji f (Model Fit)**

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>
Residual	0,035

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan uji f tabel diatas didapatkan tingkat signifikan  $0,035 < 0,05$ . Hasil tersebut membuktikan jika model ini adalah layak digunakan untuk penelitian ini.

#### 4.4.2 Uji t

Ghozali (2011) untuk pengujian *significant* parameter individu (Uji t) menunjukkan jumlah pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Uji nilai t digunakan sebagai uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang parsial. Berikut merupakan hasil pengujian t yang ditunjukkan oleh tabel 4.9 :

**Tabel 4.9 Hasil Analisa Regresi Variable Koefisien**

Variabel	Sig
Komisaris Independen (X <sub>1</sub> )	0,928
Kepemilikan Institusional (X <sub>2</sub> )	0,664
Kepemilikan Manajerial (X <sub>3</sub> )	0,032
Kualitas Audit (X <sub>4</sub> )	0,459

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil tabel 4.9 dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh tiap *variable independent* terhadap *variable dependent* :

- Dewan komisaris independen menunjukkan tidak terdapat pengaruh *significant* terhadap *Tax Avoidance*, karena signifikansi dewan komisaris independen sebesar  $0,928 > 0,05$  Ho diterima dan Ha ditolak, artinya proporsi dewan komisaris *independent* tidak mempengaruhi *tax avoidance* (Y) (H<sub>1</sub> ditolak)
- Kepemilikan Institusional menunjukkan tidak terdapat pengaruh *significant* terhadap *Tax Avoidance*, karena signifikansinya kepemilikan institusional sebesar  $0,664 > 0,05$  maka Ho diterima sehingga Ha ditolak, yang berarti

- tinggi atau rendahnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi terhadap *tax avoidance* (H2 ditolak)
- c. kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena kepemilikan manajerial mempunyai signifikansi  $0,032 < 0,05$   $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H3 diterima)
  - d. Kualitas Audit menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*, karena kualitas audit memiliki signifikansi  $0,459 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima sehingga  $H_a$  ditolak, artinya penggunaan KAP *the big four* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H4 ditolak)

#### 4.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2016) uji Koefisien Determinasi adalah satu nilai untuk pengukuran jauhnya kemampuan dari variabel independen yang dipakai pada persamaan regresi, untuk menerangkan varian variabel dependen. Skala yang digunakan dalam penilaian koefisien determinasi adalah 0-1 jika nilai  $R^2$  menunjukkan angka yang kecil menunjukkan kemampuan *variable independent* untuk menerangkan varian *variable dependent* amat dibatasi, namun apabila nilai koefisien determinasi  $R^2$  dan mendekati satu berarti variabel bebas menjelaskan seluruh informasi yang digunakan untuk menggambarkan variasi variabel terikat.

**Tabel 4.10 Analisis Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square
0,732	0,534	0,574

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.10, dijelaskan nilai R-Squared yaitu 0.574, sehingga dapat mengambil kesimpulan bahwa Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi, Kepemilikan manajerial dan Kualitas Audit, mampu mempengaruhi variabel ETR (Y) sejumlah 57.4 %, yang lain sejumlah 42,6% dipengaruhi tiap-tiap faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui peraturannya menjelaskan jika perusahaan BEI minimal memiliki 30% anggota komisaris independen dari jumlah dewan komisaris. Komisaris independen merupakan bentuk sistem pengendalian internal sebuah perusahaan. Dewan komisaris ditugaskan sebagai penjamin pelaksanaan strategi perusahaan, melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam rangka mengelola perusahaan sesuai dengan akuntabilitas.

Menurut Dewi dan Sari (2018) menemukan bahwa tidak ada pengaruh dari jumlah komisaris independen dan *tax avoidance*. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Handayani (2017) yang mengungkapkan jika dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*. Hasil penelitian ini dapat menjadi indikasi bahwa banyak ataupun tidaknya proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan, hal ini bisa disebabkan kemampuan seorang dewan komisaris independen dalam menjalankan tugasnya dalam perusahaan sebagai pengawas dan melakukan pengendalian masih kurang efektif yang bisa disebabkan oleh adanya asimetri informasi yang dimiliki oleh dewan direksi sebagai manajemen dalam perusahaan. Terlihat bahwa walaupun jumlah rata rata komisaris independen tinggi namun masih tidak berpengaruh yang mengindiskan jumlah bukan hanya factor yang dapat menentukan dalam pengawasan suatu perusahaan, melainkan juga pada objektivitas, profesionalisme dan independensi serta tanggung jawab dalam menjalankan peranannya sangat penting untuk dilakukan oleh orang yang tepat.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian setyawan et al (2019) yang menyatakan jika proporsi komisaris independent berpengaruh terhadap pengawasan dan *monitoring* perusahaan dalam mengawasi tindakan *tax avoidance*. Proporsi dewan komisaris independent yang lebih tinggi dipandang mampu untuk memberikan suara untuk mengawasi dan melakukan pengendalian dalam perusahaan.

Kesimpulan dalam penelitian ini komisarisi independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji analisis regresi linear pada Uji t dapat terlihat bahwa nilai signifikansinya yaitu sejumlah  $0,928 > 0,05$ . Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (H1 ditolak)

#### **4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Pemilik institusi adalah kepemilikan sebuah saham dari anggota institusi atas lembaga yaitu perusahaan asuransi, perusahaan investasi serta bank (Yulistian, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tandean, 2016) mengungkapkan jika kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* dapat disebabkan oleh kepentingan pemilik saham institusional lebih mementingkan perolehan laba yang tinggi sehingga tidak memperhatikan kebijakan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait pajak perusahaan, serta hal ini dapat menjadi indikasi jika pemilik saham institusional lebih berupaya berinvestasi pada perusahaan untuk jangka pendek saja bukan untuk berinvestasi jangka panjang sehingga tidak terlalu memikirkan kondisi pajak perusahaan dan lebih menginginkan *return* yang tinggi saja. Perilaku tersebut memungkinkan pemilik institusional lebih mempercayakan pengawasan terhadap tenaga profesional manajemen perusahaan, yang menunjukkan masih lemahnya monitoring dari pemilik saham serta peran dari mereka dalam mendisiplinkan serta mempengaruhi perusahaan dalam keputusan untuk mematuhi perpajakan. Keterbatasan informasi yang dimiliki pihak institusional tentang kebijakan perpajakan juga mengakibatkan pemilik saham tidak mengetahui kebijakan apa yang diputuskan pihak perusahaan terkait perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dan Mahpudin (2021) dan Setyawan et al (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan saham institusional dipandang mampu untuk memberikan suaranya

dalam perusahaan demi melindungi kepentingan perusahaan akibat tindakan tindakan seperti melakukan penghindaran pajak.

Kesimpulan dari hasil analisis regresi linear pada Uji t dapat terlihat bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar  $0,664 > 0,05$ . Kesimpulan penelitian ini adalah pemilik institusi tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* (H2 ditolak).

#### **4.5.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam *agency theory*, terdapat pembeda kepentingan manajerial serta pemilik saham yang mengakibatkan konflik dan disebut sebagai konflik agensi. Konflik agensi yang terjadi beberapa pihak menunjukkan betapa penting terapan mekanika sebagai perlindungan pemilik saham.

Menurut penelitian dari Sunarsih dan Handayani (2018) Proporsi kepemilikan saham manajerial berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Sari & Batara (2015) dan menghasilkan pemilik manajerial mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian menjelaskan jika pemilik manajerial dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi pemilik manajerial maka perusahaan cenderung untuk lebih meminimalkan tingkat penghindaran pajak yang dapat berakibat untuk perusahaan kedepannya sehingga memilih untuk tidak mengambil resiko untuk meminimalkan beban pajaknya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini pemilik manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial maka nilai *Effective Tax Rate* juga akan semakin tinggi yang membuat penghindaran pajak menurun. Hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh Septiadi et al (2017) yang menyatakan jika kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena kepemilikan saham manajerial cenderung kecil dalam perusahaan sehingga tidak efektif dalam memberikan suara dan melakukan tindakan berhati hati dalam penghindaran pajak. Kesimpulan dari penelitian ini ditunjukkan melalui hasil uji analisa regresi linier Uji t dapat terlihat bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar  $0,032 < 0,05$  dan dalam

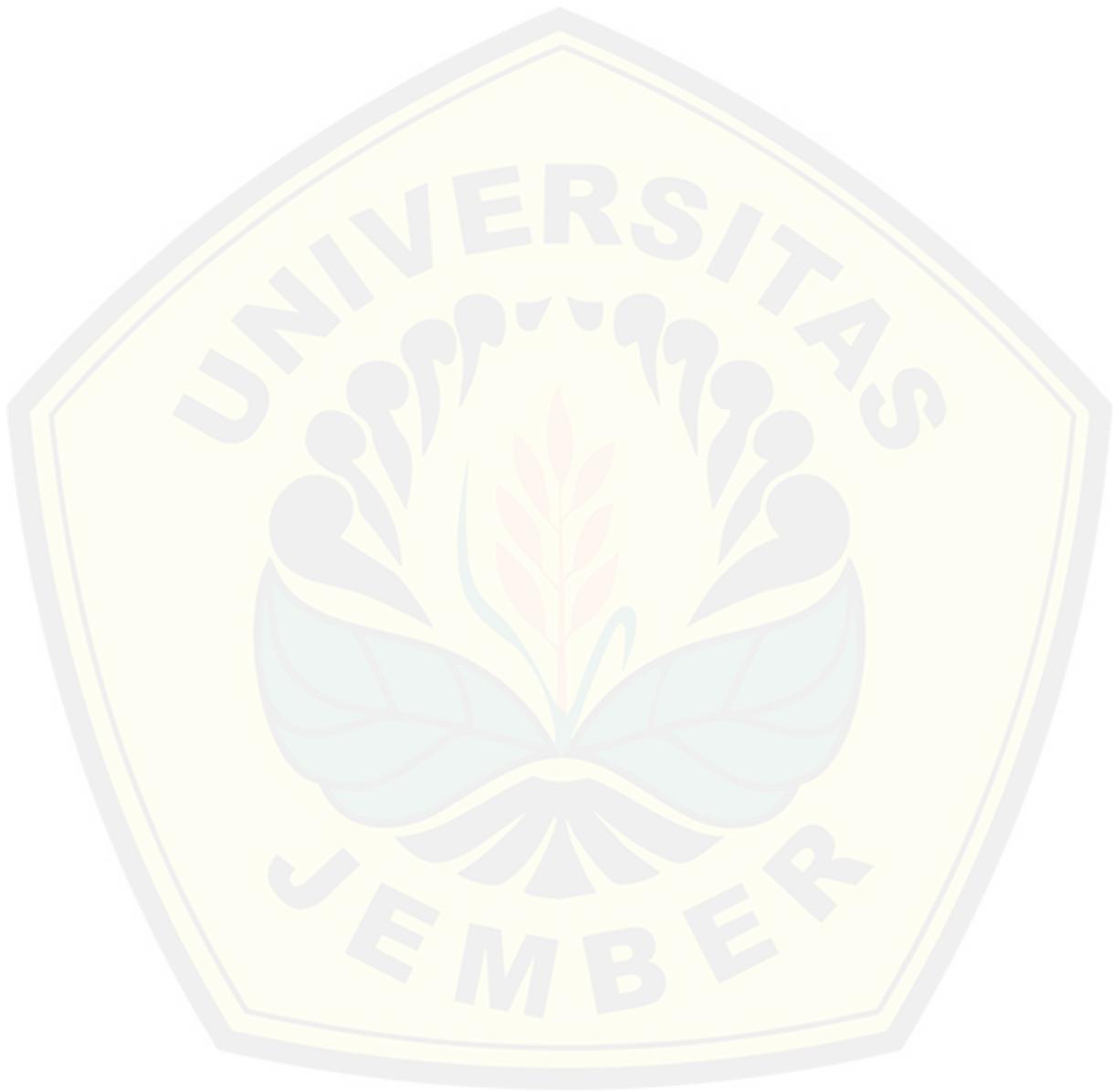
penelitian ini Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (H3 diterima).

#### 4.5.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Audit yang dilakukan oleh KAP Big Four sering sekali dipandang mampu untuk mempengaruhi opini publik terhadap kondisi perhitungan perpajakan yang terjadi dalam perusahaan. Menurut penelitian dari Septiadi et, al (2017) menemukan jika *quality audit* suatu perusahaan yang diukur dengan penggunaan auditor KAP *The Big Four* sebuah perusahaan tidak mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang terjadi didalam perusahaan. Menurut hasil statistik deskriptif dalam 3 periode, 63 data observasi dan 21 perusahaan menunjukkan terdapat total 6 perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four*, hal ini terlihat dari perusahaan memakai jasa KAP *The Big Four* memiliki nilai ETR rendah yang menunjukkan penggunaan jasa KAP *The Big Four* tidak menjamin perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Penelitian ini menunjukkan tidak ada jaminan perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit menggunakan KAP *The Big Four* ataupun KAP *non The Big Four* karena dalam melakukan audit laporan keuangan para auditor sebenarnya sudah memiliki pedoman pada standar pengendalian dan etika akuntan publik, sehingga dalam setiap melakukan tugas mereka memiliki reputasi independensi yang harus dijaga seperti yang telah ditetapkan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, namun apabila perusahaan dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan terhadap KAP yang memiliki reputasi mungkin bisa terjadi kecurangan seperti halnya kasus yang dialami oleh enron. Hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh Maraya dan Yendrawati (2016) yang menyatakan jika kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan perusahaan melakukan *tax avoidance*, menurut penelitian tersebut jika perusahaan menggunakan KAP *big four* maka tingkat penghindaran pajak akan berkurang karena KAP *big four* dipandang lebih berkualitas dalam hal melakukan audit.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Kualitas Audit tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*. Hasil pengujian analisa regresi linear pada Uji t dapat terlihat bahwa nilai dari variabel kualitas audit mempunyai signifikansi sebesar  $0,459 >$

0,05. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *kualitas audit* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* (H4 ditolak).



## BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan bertujuan yaitu untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan manajerial dan Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* (studi empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI)

Pada penelitian yang dilakukan memakai metode *purposive sampling*. *Sample* perusahaan didapatkan jumlah 21 korporat dan data observasi selama tahun 2018-2020 sebanyak 63. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kuantitatif. Data analisa yang dipakai menggunakan analisis regresi linear berganda.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dari berbagai permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak memengaruhi *tax avoidance*. Hasil analisis deskriptif menunjukkan rerata proporsi dewan komisaris independen menunjukkan angka sejumlah 40 % melebihi batas minimal yang telah ditentukan oleh BEI. Hal ini dapat menjadi suatu indikasi bahwa peranan dewan komisari independen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan yang benar masih belum dilakukan dengan optimal sehingga belum mampu menjadi alat *monitoring* tindakan direksi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*
2. kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Hal ini dapat disebabkan pemilik saham institusional lebih mempercayakan kepengawasan terhadap tenaga profesional manajemen perusahaan sehingga tidak begitu memperdulikan masalah perpajakan asal laba yang didapatkan cukup tinggi, yang ditunjukkan dengan tingginya kepemilikan institusi dengan rata rata kepemilikan sebesar 63%. Hasil ini menunjukkan besar kepemilikan institusi *tanpa* memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Kepemilikan institusi lebih

mementingkan perolehan laba yang tinggi sehingga tidak memperhatikan kebijakan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait pajak perusahaan sehingga belum mampu menjadi alat *monitoring* efektif dalam memantau dan mengawasi serta mendisiplinkan pihak manajemen yang oportunis terkait tax avoidance

3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut menunjukkan jika kepemilikan saham oleh pihak manajemen berperan serta sebagai pengawas dan pengendali. Menurut teori keagenan kepemilikan saham manajerial akan mengurangi *agency cost* karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen dapat menimbulkan perasaan hati-hati dalam mengambil keputusan agar keputusan ini tidak berdampak buruk bagi perusahaan, termasuk keputusan mengenai penerapan penghindaran pajak yang mampu menjadi permasalahan yang akan datang
4. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian statistik deskriptif menemukan bahwa dalam 3 periode ada 6 perusahaan dari 21 perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP *The Big Four* namun tingkat penghindaran pajak perusahaan yang di audit memiliki *tax avoidance* yang tinggi. Hasil ini dapat menjadi indikasi bahwa kualitas audit perusahaan yang menggunakan KAP *The Big Four* maupun *non The Big Four* tidak terlalu berbeda karena menggunakan standar audit yang sama sesuai yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, namun yang membedakan adalah bagaimana moral dan etika sang auditor apabila perusahaan dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan terhadap KAP yang memiliki reputasi tidak menutup kemungkinan kecurangan dapat terjadi

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai berbagai keterbatasan. Berikut merupakan keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Pada penelitian ini pengamatan sampel hanya berjumlah 21 perusahaan dan menggunakan 3 tahun periode sehingga data yang terkumpul masih belum terlalu banyak untuk digunakan dan data cukup terbatas

2. Variabel yang digunakan masih kurang sebagai alat prediksi terhadap *tax avoidance*

### 5.3 Saran

Penelitian ini terdapat beberapa saran. Berikut merupakan saran dalam penelitian ini :

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih lama serta meneliti lebih dalam mengenai pengaruh pada saat pandemi dan setelahnya terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel penelitian yang lebih bervariasi seperti menambahkan manajemen laba dan dan profitabilitas sehingga dapat dengan kuat memberi prediksi terhadap *tax avoidance*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andriyani, M., & Endang, M. (2021). Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Fiskal terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*
- Angelo, D. (1981, Desember). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics.*, 183-199.
- Artaningrum, G. A., & Ni Luhu Putu S.P.M. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*
- Assura, A. (2014). Analisis Penerapan Prinsip - prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Len Industri (Persero). *Jurnal Ekonomi*.
- Avianita, H., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9.
- Charisma, R. B., & Dwi Mulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating.
- Darmawijaya, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*,
- Dewi, G. A., & Sari, M. M. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13, 50-67.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Dyreng, S. D. et al. 2008. Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Eisenhardt, K. M. (1989). teori:An Assessment and Review. *The Academy of Management Review.*, 14, 57-74.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak 9 Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Fadhillah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Fauzan., Pingkhan., M., D & Ilham , N., F. (2021). *The Effect Of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.

- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI).2012. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prentice Hal
- Ghozali. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan., M., I. Mukhzarudfa., H. & Ilham., W. (2019). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*.
- Halim, A., Rangga, I., & Dara, A. (2016). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan CSR terhadap *Tax Avoidance* di Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol 8. No 3, 114-131
- Herlina, L., & Sofianty, D. (2020). PENGARUH Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). *Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 1 Standar Akuntansi (SA) Seksi 150*.
- Iskander, M., & Chamlou, N. (2000). *Corporate Governance : A Framework for Implementation*. Washington DC. USA: The World Bank.
- Jati, F. (2008). Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, agency cost, and ownership structure. *Journal Of Finance Economics*, 3, 305-360.
- Khairunnisa, K., Hapsari, D. W., & Wiwin, A. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance . *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Indonesia
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi . *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*
- Larasati, A. (2021, April 20). Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/1019/>  
<http://repository.unair.ac.id/1019/>

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Buku Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Maraya, D., A & Reni., Y. (2016). Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*
- Maretta , D., Widyastuti , T., & Darmansyah . (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance . *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen*, Vol 1 No 2.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Polimpung, L. J. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Goods dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Prahesti, D. S., & Abudanti, N. (2015). Pengaruh Risiko Kredit, Struktur Kepemilikan dan Indepen Independen Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *E-jurnal Manajemen*, 4.
- Pramuka, B. A., & Prasetyo, I. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 20.
- Ratmono, D., & Sagala, W. (2015). Pengukuran Corporate Social Responsibility sebagai sarana legitimasi: dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 16-30.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 2 Ayat 1 huruf b. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori & kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, M, F., Dandes, R., & Novia, R. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance*. *Jurnal akuntansi dan auditing Indonesia*.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Pertanian Yang Listing Di Bei 2013-2015). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1.
- Setyawan, S., Endang, D., W & Ahmad, J. (2019). Kebijakan Keuangan dan *Corporate Governance* terhadap Agresifitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol 9. No. 3. 327-342
- Subagiastra, K., Arizona, P. E., & Mahaputra, N. K. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap

- Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunarsih, U., & Ade, R. O. (2016). Pengaruh Corporate Governance terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Reviu Akuntansi Keuangan*
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Tandiontong, M. (2017). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.
- Tandean, V. A. (2016). Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Ubaidillah, M. (2021). Tax Avoidance : Good Corporate Governance. *Jurnal Riset & Akuntansi*.
- Ulupui, I. A., & Diantari, P. R. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16.
- Waluyo, W. (2017). The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance: Empirical Study Of The Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal Of Binaniaga*, 2.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 13 No 2.
- Wijayanti, A., Masitoh, E., & Mulyani, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Erlangga*

Lampiran 1 Rekap Data *Tax Avoidance*

NO	KODE	BEBAN PAJAK PENGHASILAN			PENGHASILAN SEBELUM PAJAK			ETR		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	VOKS	36.521.210.166	50.697.996.282	4.374.599.744	141.989.954.853	258.947.121.683	7.158.362.929	0,257	0,196	0,611
2	UNTR	4.210.310.000.000	4.342.244.000.000	1.378.761.000.000	15.708.719.000.000	15.476.885.000.000	7.011.186.000.000	0,268	0,281	0,197
3	SPTO	60.568.422.108	36.430.850.358	29.901.232.678	264.602.190.670	257.072.506.660	135.199.259.206	0,229	0,142	0,221
4	SKRN	58.140.753.224	41.996.587.904	3.765.718.411	121.427.473.182	179.429.573.146	13.542.168.720	0,479	0,234	0,278
5	SOSS	8.320.718.051	15.241.153.687	8.979.525.890	23.712.712.622	46.643.753.985	25.468.934.168	0,351	0,327	0,353
6	SCCO	89.029.251.172	109.811.425.973	65.905.385.002	343.024.583.828	413.405.348.304	304.057.871.487	0,260	0,266	0,217
7	MLIA	75.742.585.000	60.403.452.000	65.454.858.000	264.824.823.000	187.176.793.000	120.554.205.000	0,286	0,323	0,543
8	MARK	29.304.854.457	30.684.849.486	42.496.995.435	111.210.294.119	118.687.394.019	186.691.686.387	0,264	0,259	0,228
9	MFMI	8.029.327.765	8.411.525.362	2.486.335.736	34.539.454.566	141.858.190.209	20.661.479.556	0,232	0,059	0,120
10	KBLM	23.833.338.586	10.183.374.385	2.566.249.771	64.508.435.214	48.831.643.532	9.130.021.231	0,369	0,209	0,281
11	JECC	686.357.000.000	417.231.000.000	568.856.000.000	2.207.080.000.000	660.860.000.000	1.462.635.000.000	0,311	0,631	0,389
12	ICON	4.589.986.802	5.423.561.099	2.393.943.707	35.426.069.491	41.729.110.241	8.096.796.384	0,130	0,130	0,296
13	IMPC	11.936.029.955	40.827.845.760	59.671.603.733	117.459.959.119	133.973.045.799	175.476.928.095	0,102	0,305	0,340
14	BMTR	431.264.000.000	590.195.000.000	423.256.000.000	1.782.744.000.000	2.907.632.000.000	2.224.285.000.000	0,242	0,203	0,190
15	CAKK	4.454.589.401	1.977.222.526	2.139.535.077	17.756.980.001	4.042.948.462	2.283.938.489	0,251	0,489	0,937
16	ARNA	53.522.141.574	73.932.125.865	94.384.895.323	211.729.940.176	291.607.365.374	420.626.406.830	0,253	0,254	0,224
17	AKPI	64.226.271.000	54.355.268.000	66.005.547.000	3.070.410.492.000	2.776.775.756.000	2.644.267.716.000	0,021	0,020	0,025
18	ASGR	90.724.000.000	86.902.000.000	15.937.000.000	361.128.000.000	337.894.000.000	63.720.000.000	0,251	0,257	0,250
19	ASII	7.623.000.000.000	7.433.000.000.000	3.170.000.000.000	34.995.000.000.000	34.054.000.000.000	21.741.000.000.000	0,218	0,218	0,146
20	BHIT	577.089.000.000	625.725.000.000	661.308.000.000	1.522.284.000.000	2.713.548.000.000	2.187.197.000.000	0,379	0,231	0,302
21	APII	8.442.405.019	8.506.484.979	8.832.527.395	40.653.039.839	34.250.926.596	38.983.947.951	0,208	0,248	0,227

## Lampiran 1 Tabulasi Dewan Komisaris Independen

NO	KODE	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN		
		2018	2019	2020
1	VOKS	0,33	0,28	0,28
2	UNTR	0,33	0,33	0,33
3	SPTO	0,33	0,33	0,33
4	SKRN	0,5	0,5	0,5
5	SOSS	0,33	0,33	0,33
6	SCCO	0,33	0,33	0,33
7	MLIA	0,4	0,4	0,4
8	MARK	0,5	0,5	0,5
9	MFMI	0,5	0,33	0,33
10	KBLM	0,33	0,33	0,5
11	JECC	0,5	0,5	0,25
12	ICON	0,33	0,33	0,33
13	IMPC	0,5	0,5	0,5
14	BMTR	0,75	0,75	0,75
15	CAKK	0,5	0,5	0,5
16	ARNA	0,5	0,5	0,5
cost17	AKPI	<b>0,33</b>	0,33	0,33
18	ASGR	0,33	0,33	0,33
19	ASII	0,3	0,3	0,3
20	BHIT	0,33	0,33	0,4
21	APII	0,33	0,33	0,33

## Lampiran 1 Tabulasi Kepemilikan Institusional

NO	KODE	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL			JUMLAH SAHAM BEREDAR			KI		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	VOKS	2.144.124.110	1.917.554.123	1.666.510.165	4.155.602.595	4.155.602.595	4.155.602.595	51,6	46,1	40,1
2	UNTR	2.219.317.358	2.219.317.358	2.219.317.358	3.730.135.136	3.730.135.136	3.731.135.136	59,5	59,5	59,5
3	SPTO	1.620.000.000	1.620.000.000	1.620.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	60,0	60,0	60,0
4	SKRN	850.000.000	850.000.000	850.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	56,7	56,7	56,7
5	SOSS	500.000.000	500.000.000	500.000.000	650.000.000	655.874.505	657.017.005	76,9	76,2	76,1
6	SCCO	146.275.640	154.275.640	154.275.640	205.583.400	205.583.400	205.583.400	71,2	75,0	75,0
7	MLIA	889.685.722	889.685.722	889.685.722	1.321.060.100	1.321.060.100	1.321.060.100	67,3	67,3	67,3
8	MARK	599.047.711	2.995.238.555	2.995.238.555	760.000.062	3.800.000.310	3.800.000.310	78,8	78,8	78,8
9	MFMI	700.425.400	700.425.400	700.425.400	757.581.000	757.581.000	757.581.000	92,5	92,5	92,5
10	KBLM	916.977.800	915.960.800	915.960.800	1.064.000.000	1.064.000.000	1.064.000.000	86,2	86,1	86,1
11	JECC	136.303.300	136.303.300	136.303.300	151.200.000	151.200.000	151.200.000	90,1	90,1	90,1
12	ICON	346.189.000	346.189.000	439.422.000	1.089.750.000	1.089.750.000	1.089.750.000	31,8	31,8	40,3
13	IMPC	4.341.088.454	4.341.088.454	4.349.189.854	4.833.500.000	4.833.500.000	4.833.500.000	89,8	89,8	90,0
14	BMTR	7.506.327.500	7.479.817.500	7.480.818.100	13.843.335.622	14.979.225.486	16.352.512.086	54,2	49,9	45,7
15	CAKK	356.200.000	356.200.000	356.200.000	1.203.300.000	1.203.300.006	1.203.300.219	29,6	29,6	29,6
16	ARNA	1.026.388.000	1.027.150.000	1.030.000.000	7.326.839.776	7.326.839.776	7.255.662.176	14,0	14,0	14,2
17	AKPI	477.478.323	477.478.323	477.478.323	612.248.000	612.248.000	612.248.000	78,0	78,0	78,0
18	ASGR	1.036.752.580	1.036.752.580	1.036.752.580	1.348.780.500	1.348.780.500	1.348.780.500	76,9	76,9	76,9
19	ASII	20.288.255.040	20.288.255.040	20.288.255.040	40.483.553.140	40.483.553.140	40.483.553.140	50,1	50,1	50,1
20	BHIT	34.163.433.228	34.328.505.828	34.253.433.228	51.224.812.438	67.055.077.788	71.240.683.888	66,7	51,2	48,1
21	APII	773.340.020	773.340.020	773.340.020	1.075.760.000	1.075.760.000	1.075.760.000	71,9	71,9	71,9

## Lampiran 1 Tabulasi Kepemilikan Manajerial

NO	KODE	KEPEMILIKAN MANAJERIAL			JUMLAH SAHAM BEREDAR			KM		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	VOKS	0	0	0	4.155.602.595	4.155.602.595	4.155.602.595	0,00	0,00	0,00
2	UNTR	4.059.015	1.985.315	4.059.015	3.730.135.136	3.730.135.136	3.730.135.136	0,11	0,05	0,11
3	SPTO	0	0	0	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	0,00	0,00	0,00
4	SKRN	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	23,33	23,33	23,33
5	SOSS	0	0	0	650.000.000	655.874.505	657.017.005	0,00	0,00	0,00
6	SCCO	0	0	0	205.583.400	205.583.400	205.583.400	0,00	0,00	0,00
7	MLIA	109.374.500	353.200	353.200	1.271.994.200	1.321.060.100	1.321.060.100	8,60	0,03	0,03
8	MARK	16.000.000	0	0	760.000.062	3.800.000.310	3.800.000.310	2,11	0,00	0,00
9	MFMI	0	0	0	757.581.000	757.581.000	757.581.000	0,00	0,00	0,00
10	KBLM	0	0	0	1.064.000.000	1.064.000.000	1.064.000.000	0,00	0,00	0,00
11	JECC	0	0	0	151.200.000	151.200.000	151.200.000	0,00	0,00	0,00
12	ICON	0	0	0	1.089.750.000	1.089.750.000	1.089.750.000	0,00	0,00	0,00
13	IMPC	81.478.000	81.478.000	81.478.000	4.833.500.000	4.833.500.000	4.833.500.000	1,69	1,69	1,69
14	BMTR	96.227.540	97.269.640	83.229.640	13.843.335.622	14.979.225.486	16.352.512.086	0,70	0,65	0,51
15	CAKK	547.100.000	547.100.000	547.100.000	1.203.300.000	1.203.300.006	1.203.300.219	45,47	45,47	45,47
16	ARNA	2.740.000.000	2.740.000.000	2.740.000.000	7.326.839.776	7.326.839.776	7.255.662.176	37,40	37,40	37,76
17	AKPI	31.072.621	31.072.621	31.072.621	612.248.000	612.248.000	612.248.000	5,08	5,08	5,08
18	ASGR	0	0	0	1.348.780.500	1.348.780.500	1.348.780.500	0,00	0,00	0,00
19	ASII	20.111.900	24.524.900	23.523.900	40.483.553.140	40.483.553.140	40.483.553.140	0,05	0,06	0,06
20	BHIT	2.392.574.000	2.357.990.700	2.366.986.200	51.224.812.438	67.055.077.788	71.240.683.888	4,67	3,52	3,32
21	APII	60.146.480	60.146.480	60.146.480	1.075.760.000	1.075.760.000	1.075.760.000	5,59	5,59	5,59

## Lampiran 1 Tabulasi Kualitas Audit

NO	KODE	KUALITAS AUDIT		
		2018	2019	2020
1	VOKS	0	0	0
2	UNTR	1	1	1
3	SPTO	0	0	0
4	SKRN	0	0	0
5	SOSS	0	0	0
6	SCCO	0	0	0
7	MLIA	1	1	1
8	MARK	0	0	0
9	MFMI	0	0	0
10	KBLM	0	0	0
11	JECC	0	0	0
12	ICON	0	0	0
13	IMPC	0	0	0
14	BMTR	0	0	0
15	CAKK	0	0	0
16	ARNA	1	1	1
17	AKPI	1	0	0
18	ASGR	1	1	1
19	ASII	1	1	1
20	BHIT	0	0	0
21	APII	0	0	0

## Lampiran 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	63	.02	.94	.2700	.14643
Komisaris_Independen	63	.25	.75	.4020	.11259
Kepemilikan_Institusional	63	14.01	92.46	63.6892	20.97616
Kepemilikan Manajerial	63	.00	45.47	6.0408	12.74027
Kualitas_Audit	63	.00	1.00	.2540	.43878
Valid N (listwise)	63				

## Lampiran 3 Uji Asumsi klasik

## a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.13778545
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.134
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		1.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.210

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## b. Uji Multikolinieritas

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	.218	.108		2.011	.049	
	Komisaris_Independen	.016	.174	.012	-.090	.928	.849 1.178
	Kepemilikan_Institusional	.050	.114	.065	.400	.664	.579 1.726
	Kepemilikan Manajerial	.004	.002	.360	2.179	.032	.558 1.792
	Kualitas_Audit	-.032	.043	-.097	-7.44	.459	.899 1.113

a. Dependent Variable: ETR

**c. Uji Autokorelasi****Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Values	-.00684
Cases < Test Value	31
Cases >= Test Value	32
Total Cases	63
Number of Runs	34
Z	.383
Asymp. Sig. (2-tailed)	.702

a. Median

**d. Uji Heteroskedastisitas****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.186	.379		.492	.624
Komisaris_Independen	-.604	.609	-.137	-.991	.326
Kepemilikan_Institusional	.007	.004	.288	1.726	.090
Kepemilikan Manajerial	.009	.007	.228	1.341	.185
Kualitas_Audit	.009	.152	.008	.058	.954

a. Dependent Variable: Abs\_Res

**Lampiran 4 Uji Hipotesis****a. Uji t****Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.218	.108		2.011	.049
Komisaris_Independen	.016	.174	.012	.090	.928
Kepemilikan_Institusional	.050	.114	.065	.400	.664
Kepemilikan Manajerial	.004	.002	.360	2.179	.032

Kualitas_Audit	-.032	.043	-.097	-.744	.459
----------------	-------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: ETR

**b. Uji F (Model Fit)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.083	4	.021	3.874	.035 <sup>b</sup>
1 Residual	.537	58	.009		
Total	.620	62			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), Kualitas\_Audit, Kepemilikan Manajerial, Komisaris\_Independen, Kepemilikan\_Institusional

**c. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 <sup>a</sup>	.534	.574	.09625

a. Predictors: (Constant), Kualitas\_Audit, Kepemilikan Manajerial, Komisaris\_Independen, Kepemilikan\_Institusional

b. Dependent Variable: ETR

